

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DI KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR**

TESIS

**SAPARUDDIN. I
NIM: 4618103006**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah kota Makassar**
2. Nama Mahasiswa : **Saparuddin. I**
3. NIM : **4618103006**
4. Program Studi : **Administrasi Publik**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si

Dr. Nurkaidah, M.M.

Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Negara

Prof.Dr.Ir.Batara Surya, M.Si
NIDN. 20913017402

Prof.Dr.H.Andi Rasyid Pananrangi, SH,M.Pd
NIP. 19560110 198303 1 002

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Saparuddin. I
NIM	: 4618 103 006
Program Studi	: Administrasi Publik
Judul Tesis	: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, September 2020

Pembuat Pernyataan

Saparuddin. I

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya kasih dan karunia-Nya yang sungguh tidak berkesudahanlah sehingga tesis dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”** ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si dan Dr. Nurkaidah, M.M., selaku pembimbing bagi penulis, atas segala waktu, perhatian dan nasehat serta petunjuk dalam memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberi bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan.
2. Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melanjutkan studi.
3. Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, S.H., M.Pd selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik
4. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si dan Dr. Nurkaidah, M.M. selaku Ketua dan Sekretaris Tim Penguji bagi penulis.

5. Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S dan Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd selaku Anggota Tim Penguji bagi penulis.
6. Seluruh Dosen Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu dalam bidang administrasi publik kepada penulis
7. Seluruh Staf Akademik Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak membantu kepada penulis selama proses pendidikan.
8. Drs. Andi Unru, M.Si selaku Camat Ujung Tanah Kota Makassar yang telah menyediakan waktu dan tenaga sebagai pengarah dan pemberi informasi kepada penulis.
9. Abdul Haris, S.Sos selaku Kasi. Kebersihan Kecamatan Ujung Tanah yang bersedia memberikan waktu luang dalam memberikan informasi kepada penulis.
10. M. Asir, SE, M. Amin Usman, Drs. Tujuardi dan Ibu Nasrawati selaku Pengawas Kebersihan yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, informasi serta data sebagai bahan yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
11. Seluruh teman-teman kelas mahasiswa pascasarjana Program studi Administrasi Publik Universitas Bosowa Makassar yang selalu memberi support dalam penyelesaian tesis ini.
12. Seluruh pihak yang berkontribusi atas penyelesaian tesis ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan tidak disebutkan bukan berarti mengurangi bantuan dan dukungan kalian.

Penulis mempersembahkan tesis dan gelar nantinya kepada ayahanda tercinta Dg. Ismail.T dan Ibunda tercinta Dg. Saripah (Alamarhumah), Istriku yang tercinta Sahida Aras, serta anak-anakku tercinta Muh. Fakhri Mulyawan. S dan Muh. Faried Darmawan. S, Doa dan kasih sayang mereka adalah kunci dalam kesuksesan penulis dalam berkarir. Persembahan ini juga tertuju kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis.

Akhir kata, dengan segala kekurangan, semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depan. *Aamiin.....!*

Makassar, September 2020

SAPARUDDIN. I

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Lingkup Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	14
2.1 Tinjauan Teori	14
A. Kebijakan Publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik	14
2. Tahap-tahap dalam perumusan Kebijakan Publik	16
B. Implementasi Kebijakan Publik	18
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	18
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	21
C. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan	29
D. Pengelolaan Persampahan	32

1. Pengertian Pengelolaan	32
2. Pengertian Persampahan	33
3. Pengelolaan Sampah	39
E. Peran serta masyarakat dalam implementasi pengelolaan persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah	44
2.2 Tinjauan Normatif	46
A. Undang-undang No. 23 Tahun 2014	46
B. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016	46
C. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 8 Tahun 2016	47
D. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011	47
2.3 Penelitian Terdahulu	48
2.4 Kerangka Konsep	50
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Desain Penelitian	52
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.3 Fokus dan Deskripsi Fokus	53
3.4 Instrumen Penelitian	53
3.5 Narasumber / subjek dan objek penelitian	54
3.6 Identitas Informan	55
3.7 Sumber dan Jenis Data	55
3.8 Teknik Pengumpulan Data	56
3.9 Teknik Analisis Data	58
3.10 Uji Keabsahan Data	59

3.11	Operasionalisasi Konsep	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		63
A.	Gambaran Umum Kecamatan Ujung Tanah	63
B.	Hasil Penelitian	69
1)	Penerapan fungsi manajemen dalam pengelolaan per – Sampahan di Kecamatan Ujung Tanah	69
2)	Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai kebersihan di – Kecamatan Ujung Tanah	76
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	84
BAB V PENUTUP		105
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		110

Abstrak

SAPARUDDIN. I, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar*. (Dibimbing oleh Hj. Juharni dan Nurkaidah)

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada bulan Juni-Juli 2020. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif berdasarkan fenomenologi yang terjadi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam penanganan persampahan; dan (2) Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Ujung Tanah dalam meningkatkan kinerja pegawai mengatasi persampahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ditinjau dari aspek perencanaan (*planning*) sudah optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut antara lain ketersediaan data volume sampah masyarakat, data sarana dan prasarana / armada yang dimiliki, dan data petugas / satgas kebersihan, Ditinjau dari aspek pengorganisasian (*organizing*) belum optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut yaitu ketersediaan struktur organisasi pengelolaan persampahan, dan pembagian tugas pengelolaan persampahan memang sudah ada, namun saat ini di Kecamatan Ujung Tanah secara teknis masih membutuhkan sumber daya manusia dari unsur pengawas langsung dilapangan dan staf, mengingat 3 orang pengawas dilapangan dianggap tidak cukup mencakup 9 Kelurahan yang semestinya juga memiliki pengawas berjumlah 9 orang dimasing-masing Kelurahan, begitupun ketiadaan staf pelaksana dibagian pengelolaan kebersihan kecamatan membuat kadang kepala seksi dan pengawas kesulitan dalam hal pelaksanaan pengadministrasian umum. (2) Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ditinjau dari aspek pelaksanaan (*actuating*) sudah optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut yaitu berjalannya pengelolaan sampah dengan baik proses mulai dari pemilahan sampah rumah tangga lalu penjemputan sampah masyarakat baik diruas-ruas jalan maupun dilorong-lorong / gang, kemudian proses bongkar muat sampah di terminal sampah kecamatan yang dimiliki berjalan dengan baik, sampai kemudian sampah tersebut diangkut sampai ke TPA (tempat pembuangan akhir), Ditinjau dari aspek pengawasan (*controlling*) sudah optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern sudah berjalan, pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dimasyarakat secara intern dilakukan oleh pengawas kebersihan kecamatan bersama unsur pimpinan kecamatan dan Pemerintah Kelurahan setempat, sedangkan pengawasan secara ekstern kadang pengaduan langsung dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bilamana mereka menemukan sampah yang tidak terangkut baik dirumah tangga maupun yang mereka temukan diruas-ruas jalan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Persampahan

ABSTRACT

Saparuddin.I, 2020."implementation of solid waste management policies in the sub-district of the tip of land in the city of Makassar" Public Administration Study Program, Postgraduate Bosowa University Makassar Advisors: (1) Hj. Juharni, (2) Nurkaidah.

This research was conducted in Ujung Tanah District, Makassar City in June-July 2020. The approach in this study used a qualitative descriptive based on the phenomenology that occurred. Data collection techniques through observation, in-depth interviews, and literature study. The objectives of this research are: (1) To find out how the management function is applied in handling solid waste; and (2) To find out the strategies carried out by the Ujung Tanah Subdistrict government in improving employee performance in overcoming solid waste.

The results showed that: (1) Solid waste management in Ujung Tanah District, Makassar City in terms of planning aspect (planning) is optimal. The indicators used to assess these aspects include the availability of data on the volume of community waste, data on facilities and infrastructure / fleets owned, and data on cleanliness officers / task forces (resources), so that what will be planned is ready then to carry out activities / technical program related to solid waste management in Ujung Tanah District. in terms of organizing aspects is not optimal. The indicators used to assess this aspect are the availability of a solid waste management organizational structure, and the division of tasks for solid waste management already exists, but currently in Ujung Tanah District technically it still requires human resources from direct field supervisors and staff, bearing in mind 3 field supervisors. it is considered insufficient to cover 9 sub-districts which should also have 9 supervisors in each sub-district, as well as the absence of an executive staple in the sub-district cleanliness management division, which sometimes makes it difficult for section heads and supervisors to carry out general administration. (2) Solid waste management in Ujung Tanah District, Makassar City in terms of actuating is optimal. The indicator used to assess this aspect is the implementation of good waste management, the process starting from sorting household waste to picking up community waste both on roads and alleys, then the process of loading and unloading waste at the district garbage terminal that is owned is running well Until then, the waste is transported to the TPA (final disposal site). in terms of controlling aspects is optimal. The indicators used to assess these aspects are internal supervision and external supervision that have been running, supervision of the implementation of waste management in the community internally is carried out by the sub-district sanitation supervisor together with the sub-district leadership elements and the local village government, while external supervision sometimes complaints. This is done directly by the community itself whenever they find trash that is not transported either at home or that sometimes they find on roads.

Keywords :Implementation, Policy, Solid Waste Management

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah kota Makassar**
2. Nama Mahasiswa : **Saparuddin. I**
3. NIM : **4618103006**
4. Program Studi : **Administrasi Publik**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si



Dr. Nurkaidah, M.M.

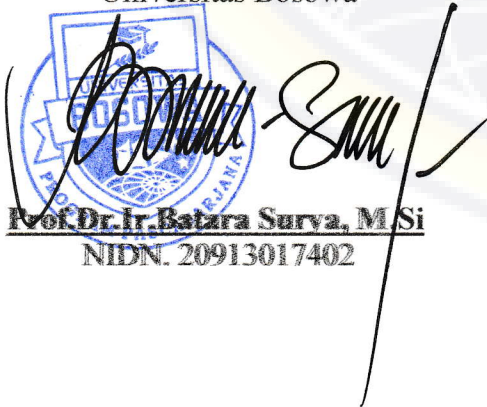
Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana

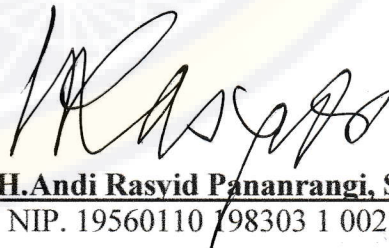
Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Magister Administrasi Negara



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN. 20913017402



Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH, M.Pd
NIP. 195601101983031002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah kota Makassar**
2. Nama Mahasiswa : **Saparuddin. I**
3. NIM : **4618103006**
4. Program Studi : **Administrasi Publik**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si



Dr. Nurkaidah, M.M.

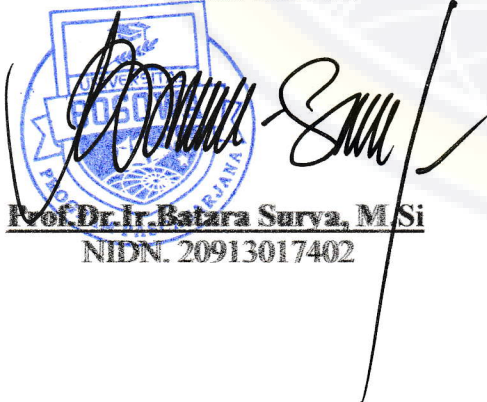
Mengetahui :

Direktur Program Pasca Sarjana

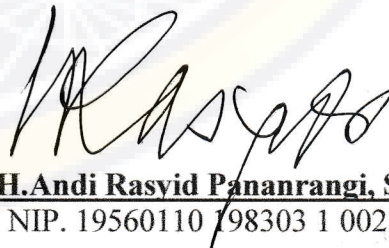
Ketua Program Studi

Universitas Bosowa

Magister Administrasi Negara



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN. 20913017402



Prof. Dr. H. Andi Rasyid Pananrangi, SH, M.Pd
NIP. 19560110 198303 1 002

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

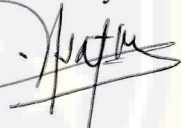
Nama : Saparuddin. I
NIM : 4618 103 006
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, September 2020



Pembuat Pernyataan


Saparuddin. I

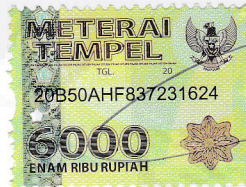
PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saparuddin. I
NIM : 4618 103 006
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, September 2020



Pembuat Pernyataan


Saparuddin. I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan tersebut harus menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat di berbagai bidang, Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional masa sekarang ini mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama dalam pembangunan kota, baik pembangunan Kota, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan bahkan sampai ke Pedesaan yang seiring dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang ditunjukkan dengan pertumbuhan kegiatan produksi dan konsumsi.

Kota sebagai Pusat aktivitas manusia memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang bermukim dipedesaan dan disekitar kota tersebut, sehingga mereka termotivasi untuk datang ke kota yang menurut anggapan mereka, kota menjanjikan masa depan yang lebih baik, menyebabkan tingkat arus urbanisasi semakin tinggi. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di kota maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan yang kurang baik. Sampah yang merupakan bagian sisa-sisa aktivitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan

berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit.

Pengelolaan sampah di kota – kota di Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi. Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering di prioritaskan penanganannya di daerah perkotaan.

Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.

Sumber permasalahan sampah yang hadir mulai dari titik awal produksi sampah yakni rumah tangga, pengangkutan sampah rumah tangga dilorong-lorong sampai di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) menjadi persoalan utama pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar.

Berikut beberapa faktor penyebab penumpukan sampah yaitu (1).Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya – jarak TPA dan pusat sampah relative jauh sehingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif (2).Fasilitas pengangkutan sampah

terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah. Sisa sampah di TPS berpotensi menjadi tumpukan sampah. (3). Teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga lambat membusuk (4). Tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah. Masyarakat sering membuang sampah di sembarang tempat sebagai jalan pintas (5) Kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah serta produknya. Minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan sampah secara tepat (6). Manajemen sampah tidak efektif. Selanjutnya masalah yang sering timbul dalam penanganan sampah adalah tingginya tingkat pencemaran yang berasal dari sampah rumah tangga, pasar, rumah sakit, sekolah dan tempat – tempat umum lainnya. Tingginya tingkat pencemaran tersebut sebagai akibat makin padatnya penduduk dan makin meningkatnya aktivitas manusia sehingga volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pula, sehingga terjadilah penumpukan sampah oleh karena volume sampah yang dapat diangkut dan dikelola tidak seimbang dengan volume produksi sampah, Penumpukan sampah tersebut tentunya mempunyai dampak yang negative terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga sangat diperlukan system pengelolaan persampahan yang memadai.

Pelaksanaan pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi komponen – komponen yang mendukung yaitu : aspek tekhnis, kelembagaan, hukum atau peraturan, pembiayaan maupun peran serta masyarakat. Demikian halnya yang terjadi di Kota Makassar sebagai kota metropolitan masalah persampahan masih merupakan masalah yang sangat kompleks.

Upaya pengelolaan persampahan yang efektif dan efisien mulai dari tahap pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga tahap pembuangan akhir namun dengan melihat keadaan lingkungan di kota Makassar saat ini di beberapa wilayah tertentu mulai dari ruas jalan raya, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan perkantoran, sekolah – sekolah, sekitar pusat perbelanjaan (Mall), pasar – pasar tradisional dan kanal, masih sering ditemukan sampah yang menumpuk karena tidak terangkut setiap harinya.

Tentunya keadaan ini menimbulkan ketidaknyamanan pemandangan, menimbulkan bau tidak sedap, memperbesar timbulnya bahaya banjir pada saat musim hujan karena tersumbatnya saluran air / drainase kota serta dapat menjadi sumber penyakit. Menyatakan bahwa pengelolaan sampah di kota Makassar masih sangat buruk. Dengan tingkat produksi sampah 3.680 meter kubik (M^3) per hari, yang tertangani oleh Pemerintah Kecamatan hanya 3.270 meter M^3 sebanyak 410 M^3 lainnya tidak terangkut dan hanya menumpuk ditempat pembuangan sementara (TPS) sampah dan sebagiannya sudah dapat dikelola melalui program Bank Sampah dan Kerajinan-kerajinan kreatif dari daur ulang bahan sampah.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan, di Kota Makassar dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa, setiap hari jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 3.680 m^3 per hari. Akan tetapi, sampah yang tertangani hanya 3.270 m^3 . Dengan demikian, masih ada sekitar 410 m^3 sampah per hari yang tidak terkelola serta lambatnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA maupun pelayanan sampah dari rumah ke rumah karena jumlah armada pengangkut sampah masih sangat kurang, jumlah mobil pengangkut sampah hanya 139 unit

padahal untuk mengangkut sampah 3.680 m³ per hari idealnya dibutuhkan 250 unit. Sementara armada pengangkut sampah yang ada sekarang juga tidak berfungsi maksimal karena ada yang sudah tua dan sering rusak.

Padatnya jumlah penduduk pada suatu daerah akan membuat sistem sanitasi pada daerah tersebut menjadi menurun. Salah satu sistem sanitasi yang akan berpengaruh oleh padatnya penduduk adalah persampahan. Permasalahan sampah merupakan hal genting yang memerlukan perhatian besar karena manusia setiap harinya menghasilkan sampah baik itu sampah organik maupun sampah anorganik.

Di wilayah kota/kabupaten pun, masalah sampah masih menjadi perhatian masyarakat terutama menyangkut kebersihan lingkungan. Terkait dengan persampahan di kota Makassar maka rumusan permasalahan yang ada di perkotaan khususnya Makassar adalah bagaimana kondisi persampahan di Kota Makassar ditinjau dari volume timbulan sampah, aspek ketersediaan sarana perwadhahan, pengumpulan dan pengangkutan serta sistem pemanfaatan sampah kembali yang diterapkan pemerintah dan masyarakat Kota Makassar.

Seiring berkembangnya suatu kota maka semakin meningkat pula jumlah daerah kumuh pada suatu wilayah. Salah satu penyebab meningkatnya daerah kumuh diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk. Karakteristik daerah kumuh yang paling menonjol terlihat dari kualitas bangunan rumahnya yang tidak permanen dengan kerap bangunan yang tidak tinggi dan tidak teratur, prasarana jalan yang terbatas dan tidak adanya saluran drainase dan tempat penampungan sampah sehingga terlihat kotor serta tidak mempunyai fasilitas sanitasi kesehatan seperti Mandi, Cuci, Kakus. Saluran air kotor dan air bersih kawasan pemukiman cenderung mengikuti garis pantai ke Utara dan Barat Daya mengikuti kegiatan penimbunan sampah.

Permasalahan sampah merupakan hal yang memerlukan perhatian serius, karena dampaknya terhadap lingkungan sangatlah besar. Seperti yang kita ketahui, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pemakaian barang rusak atau bercat pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.

Sampah ialah semua jenis benda atau barang bangunan/kotoran manusia, hewan, atau tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dari aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat menimbulkan dan atau mengakibatkan pencemaran terhadap air, tanah dan udara sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup manusia (Soemandi, 2008 : 37).

Implementasi sistem desentralisasi (otonomi daerah) merujuk format yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan kedua UUD 1945 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18 dinyatakan sebagai berikut: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah

propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selain dari itu, dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan disegala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka sistem pemerintahan Negara Indonesia yang merupakan Negara kesatuan berbentuk Republik, dibentuk pemerintahan daerah sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak masa orde lama, orde baru hingga era reformasi sekarang ini, pemerintah selalu melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar menjadi manusia seutuhnya yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Karena pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan berencana untuk mendapatkan kondisi masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan yang digalakkan ini diartikan sebagai proses

multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar, baik terhadap struktur ekonomi, dan perubahan sosial.

Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai **Kota Ujung Pandang** adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota Internasional serta terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan.

Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu urutan kedua terbesar di luar pulau Jawa setelah kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima berpenduduk terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, di antaranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa.

Sejak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar dimasukkan dan menjadi bagian dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar, pengelolaan retribusi persampahan kini menjadi urusan dari masing-masing Kecamatan di Kota Makassar.

Dengan diambil alihnya pengelolaan persampahan oleh pihak kecamatan diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah yang kian meresahkan pada ruas-

ruas jalan di kota Makassar. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang seharusnya diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dimana dalam hal ini jika pengelolaan retribusi persampahan berjalan dengan efektif maka bukan tidak mungkin Makassar bisa menjadi Kota Dunia yang sama-sama kita inginkan.

Seiring berjalannya waktu maka pada tahun 2016 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, hal ini membuat beberapa struktur organisasi Pemerintahan di Kota Makassar harus mengalami perombakan baik Perangkat Daerah yang dilebur/dipisah, digabung maupun perubahan status serta yang tidak mengalami perubahan sama sekali pada Perangkat Daerah di Kota Makassar, maka dengan ini terbitlah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dan salah satu perangkat daerah yang mengalami perubahan atas terbitnya Peraturan Daerah ini yaitu Dinas Pertamanan dan Kebersihan dilebur menjadi dua bidang yakni Bidang Penghijauan dan Bidang Kapasitas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Pada tahun 2017 pengelolaan persampahan, Kebersihan, Pertamanan serta aset dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan dialihkan ke 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar.

Hal ini membuat tugas baru bagi Camat di Kota Makassar sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan ini harus selesai pada akhir Desember 2016, ini juga dilakukan menyusul adanya

kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengharuskan struktur organisasi seluruh pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten untuk menyesuaikan dengan nomenklatur jajaran kementerian. Jadi bidang penataan kebersihan dan pertamanan akan dialihkan ke-14 Kecamatan di Kota Makassar termasuk pada Lokasi penelitian pada Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian permasalahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dikarenakan pengelolaan Persampahan, Kebersihan dan pertamanan baru dikelola oleh pihak Kecamatan ujung tanah, pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Pada pelayanan persampahan di Kecamatan Ujung tanah pemerintah kota Makassar telah memberikan amanah dan kepercayaan pihak Kecamatan untuk mengelola pelayanan persampahannya masing-masing, adanya pelimpahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Tanah, Bertitik tolak pada proses pelaksanaan kebersihan Kota Makassar dalam mewujudkan Kota Makassar Tidak Rantasa (MTR).

1.2 Rumusan Masalah

Setelah diuraikan mengenai latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi objek pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi manajemen dalam pengelolaan persampahan pada OPD Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ?
2. Bagaimana strategi peningkatan kinerja pegawai yang terkait dengan pengelolaan persampahan pada OPD Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, maka penelitian yang dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu Penulis, dan terkhusus membahas masalah “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui fungsi manajemen dalam pengelolaan persampahan pada OPD Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
2. Guna mengetahui seperti apa strategi peningkatan kinerja pegawai yang terkait dengan pengelolaan persampahan pada OPD Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

1.4 Manfaat penelitian

Apabila hasil yang dicapai dalam penelitian ini akurat, semoga dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Makassar itu sendiri, dimana manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dengan melihat permasalahan yang sama atau ruang lingkup yang lebih

luas guna mengetahui Implementasi kebijakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

- b. Dapat dijadikan sebagai perbandingan antara teori yang penulis dapatkan dibangku kuliah yang bersifat teoritis ke dalam bentuk penelitian yang bersifat ilmiah.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan Studi pada Program studi administrasi negara Universitas Bosowa Makassar.
- d. Untuk Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu pemerintahan.
- e. Diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait tentang Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam rangka penyusunan Kebijakan dimasa mendatang, khususnya dalam Pengolahan Sampah.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada aparaturn pemerintah yang dapat dijadikan sebagai sumber pustaka atau bahan bacaan, maupun mahasiswa yang ingin mengembangkan pengetahuan bagaimana Pengelolaan Sampah di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

1.5 Lingkup penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Luas lingkup hanya meliputi kantor kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar
- b. Lingkup masalah pada penelitian ini hanya pembahasan mengenai gambaran Implementasi dari Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Akhtar H, Soetjipto HP. *Peran Sikap Dalam Memediasi Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku Minimisasi Sampah Pada Masyarakat Terban*, Yogyakarta. J Mns Dan Lingkung. 2015
- Badan Standar Nasional (BSN). (2002). *Standar Nasional Indonesia Nomor SNI19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*.
- Damanhuri, E dan Padmi, T. (2010). *Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah*. Institut Teknologi Bandung
- Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B,(2003).*The New Public Service : Serving, not Steering*. M.E. Sharpe, Inc.New York.
- Emerson, H. yang dikutip oleh Handyaningrat, (2005), *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Haji Masagung.
- Gibson, L James, (2004), *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*,:Terjemahan. (Jilid 2, Edisi Kedelapan), Jakarta, Binarupa Aksara.
- Handyaningrat, Soewarno, (1986), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta, C.V. Haji Masagung.
- Handoko, Hani T, (2000), *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ibrahim, Amin, (2007), *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*, Bandung : Aditama.
- Islamy, Irfan, (2003), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, Bina Aksara.
- Jayadiningrat, Surna T, (1997), *Pengantar Ekonomi Lingkungan*, Jakarta, LP3ES.
- Kaho, Joseph Riwu, (1996), *Mekanisme Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta, Bina Aksara.
- KBBI, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Luar Jaringan (offline)*, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.
- Koontz, Harold, at.all, (1994), *Manajemen (Jilid 1)*, Jakarta, Erlangga.

- Makmur, (2011), *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, Refika Aditama.
- Manan, Bagir, (2001), *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII Yogyakarta.
- Manik, K.E.S., (2003), *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Djambatan.
- Margono, Halim, (2001), *Efektivitas*, Jakarta, Mandar Maju.
- Munawir, (2002), *Perpajakan*, Jakarta, Liberti.
- Muslimin, Amrah, (1982), *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni Bandung.
- Nasution, (2003), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Osborne, David dan Ted Gaebler, (2000), *Mewirusahaakan Birokrasi*.PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Pasolong, Harbani,(2007),*Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Soemardi, (1992), *Manajemen Sumber Daya Manusia berdasarkan Kompetensi*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Suandy, Erly, (2001), *Perpajakan*, Edisi 1, Jakarta, Salemba Empat.
- Sugiyono, (2004), *Metode Penelitian*, Bandung, Alfabeta.
- Sujamto, (1994), *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sutarto, (1995), *Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah*, (Vol. 4) Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman, Prisma.
- Syafruddin, Ateng, (1991), *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Tingkat II dan Perkembangannya*, Jakarta, Mandar Maju.
- Terry, George R and Rue, Leslie W, (2003), *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Terry, George R, (2006), *Guide to Management*, Terjemahan: J. Smith. D.F.M, Jakarta, Bumi Aksara.

Thoha, Miftah, (2008), *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Winardi,(1999),*Pengantar tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*,Bandung : Mandar Maju.

Yani, Ahmad, (2002), *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta, Grafindo.

Dokumen - Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.

SUMBER INTERNET

Lawo, Arief. (2015), "*Apa Itu Manajemen Publik..?*".*Jurusan Administrasi Negara/Manajemen dan Kebijakan Publik UGM*, (Online), (<https://arifcintaselvia.wordpress.com/kuliah/manajemen-publik/apa-itu-manajemen-publik/>), diakses 23 April 2018.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 2349/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs Univ. Bosowa Makassar Nomor : 335/B.03/PPs/Unibos/IV/2020 tanggal 12 April 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SAPARUDDIN**
Nomor Pokok : 4618103006
Program Studi : Adm. Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 April s/d 23 Juli 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 23 April 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



Ir. IFFAH RAFIDA DJAFAR, ST., MT.
Nip : 19741021 200903 2 001

Tembusan Yth
1. Direktur PPs Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. Peninggal.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 20 Mei 2020

K e p a d a

Nomor : 070 / 717 -II/BKBPV/2020
Sifat :
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth. CAMAT UJUNG TANAH
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2349/S.01/PTSP/2020 Tanggal 23 April 2020, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **SAPARUDDIN**
NIM / Jurusan : 4618103006 / Adm. Publik
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / Universitas Bosowa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar
Judul : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN DI KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA
MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Tesis** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **20 Mei s/d 23 Juli 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin pengambilan data ini**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN



Ir. H. JAMAING, M.Sc

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19601231 198003 1 064



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN UJUNG TANAH**

Sekretariat : JL.Sabutung Timur No.200 Tlp : 4666841 Makassar 90161

SURAT KETERANGAN

Nomor : 187/KUT/VIII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SAIFUL, SE., MM.**
Nip : 19681104 200701 1 021
Jabatan : Sekretaris Camat Ujung Tanah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **SAPARUDDIN**
Nim/Jurusan : 4618103006 / Adm. Publik
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / Universitas Bosowa
Alamat : Jl Urip Sumoharjo Km. 04 Makassar.

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Kecamatan Ujung Tanah mulai Tanggal, 20 Mei s/d 23 Juli 2020 untuk memperoleh data dan informasi guna penyusunan tugas akhir Tesis dengan judul "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Makassar, 18 Agustus 2020

a.n. Camat Ujung Tanah
Sekcam

SAIFUL, SE. MM.

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19681104 200701 1 021

PEDOMAN WAWANCARA

A. Manajemen Pengelolaan

1. Perencanaan (**Planning**) yang dipersiapkan dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah
2. Struktur **Organisasi** dan pola pengorganisasian penanganan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah
3. Pelaksanaan (**Actuating**) penanganan pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah
4. Bentuk Pengawasan (**Controlling**) yang dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi

B. Strategi Peningkatan Kinerja

1. Berorientasi tujuan

- a. Kepedulian dan orientasi tujuan yang sama pada hasil akhir
- b. Pendekatan penilaian yang berorientasi tujuan

2. Hubungan Kerja

- a. Hubungan kerja yang terjadi antara individu-individu antara mereka di dalam organisasi
- b. Hubungan kerja yang terjadi antara individu dalam organisasi dengan pihak luar

3. Pola Kerjasama

- a. Pola kerjasama sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih
- b. Kepentingan bersama atau kerja sama dengan pihak luar

4. Iptek

- a. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan
- b. Pemanfaatan Teknologi dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan



TRANSKIP WAWANCARA

C. Informan 1

Nama Informan : AU
 Tanggal : 06 Juli 2020
 Tempat Wawancara : Ruang Camat Ujung Tanah

	Topik Wawancara
Peneliti	Perencanaan apa yang dipersiapkan dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah?
Informan	Program dan kegiatan dibidang pengelolaan sampah kita rumuskan dengan pendekatan data yang ada tentunya dengan melihat semua sumber daya yang kita miliki seperti jumlah petugas satgas kebersihan dan jumlah armada / peralatan yang kita miliki serta mempertimbangkan jumlah penduduk yang akan dilayani serta volume sampah yang dihasilkan masyarakat.
Peneliti	Bagaimana pola pengorganisasian penanganan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah?
Informan	Sudah lengkap personil untuk satuan tugas (satgas) kebersihannya, kekurangan pada jumlah pengawas kebersihan yang Cuma 3 orang meng cover 9 Kelurahan, itu kami anggap belum cukup dan staf pengelola dibagian kebersihan juga baru 1 orang, kedepan kita usahakan ditambah.
Peneliti	Seperti apa pelaksanaan penanganan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah?
Informan	Pelaksanaannya sudah berjalan optimal secara teknis bagaimana pelaksanaan kerja penyapu, sopir fukuda, sopir truk tangkasaki, pemotong rumput, penyiram dll, boleh ditanyakan langsung secara teknis oleh Pak Kasi Kebersihan Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Kasi Kebersihan Kelurahan ditingkat Kelurahan.
Peneliti	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi?
Informan	Iya, kita punya pengawas kebersihan 3 orang, ini saya rasa ini belum cukup untuk pengawasan secara internal maka diperlukan pengawasan eksternal yakni dari masyarakat dan juga Lurah beserta perangkatnya dibawah.
Peneliti	Untuk peningkatan kinerja pegawai dilingkup pengelolaan persampahan, strategi apa yang dilakukan?
Informan	Kita selalu upayakan gaji mereka dibayarkan tepat waktu dan tepat jumlah serta operasional kegiatan mereka pun demikian selalu kami usahakan, Alat-alat kerjanya pun selalu disediakan untuk menopang kerja-kerja mereka lalu mereka sewaktu-waktu kami

	undang untuk membicarakan keluhan dan kendala pekerjaannya melalui rapat rutin bulanan yang dilaksanakan dan tentunya membangun kedekatan kepada mereka sehingga mereka merasa kita menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mereka, karna kita tahu dan sadar bahwa pekerjaan yang mereka tekuni adalah sampah yang berbau, kotor dan jorok hingga tidak semua orang mau menekuninya dan menjadi pahlawan terdepan menciptakan kebersihan dan keindahan kota yang kita cintai, yang kita harapkan jauh dari persoalan sampah.
--	--

Informan 2

Nama Informan : AH

Tanggal : 07 Juli 2020

Tempat Wawancara : Ruang Kasi Kebersihan dan Pertamanan

	Topik Wawancara
Peneliti	Perencanaan apa yang dipersiapkan dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah?
Informan	Tentunya diawali atas arahan pimpinan yang menjadi perhatian dan tinjauan awal pelaksanaan semua kegiatan pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah dan tetap mengikuti standar, operasional dan prosedur pelaksanaan kegiatan.
Peneliti	Bagaimana pola pengorganisasian penanganan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah?
Informan	Berjalan pelaksanaannya sesuai peraturan daerah kota Makassar tentang organisasi perangkat daerah dimana pimpinan tertinggi OPD adalah Camat, kemudian Sekretaris Camat, Kasi Kebersihan selanjutnya tenaga Non ASN yang menjadi pengawas dan satgas kebersihan dilapangan, semua berjalan terstruktur dan terorganisir secara optimal.
Peneliti	Seperti apa pelaksanaan penanganan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah?
Informan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk penyapu jalan mulai melaksanakan kerjanya menyapu jalan dari Pukul 05.00 Dini hari diruas-ruas jalan protokol dengan diawasi oleh seorang pengawas untuk seluruh penyapu jalan di Kec. Ujung Tanah. - Anggota penyiram tanaman juga melaksanakan pekerjaannya dengan peralatan motor penyiram melakukan pemeliharaan tanaman-tanaman di Taman-Taman Kota diruas-ruas jalan - Anggota pemotong rumput melaksanakan aktivitasnya dengan menyisir tempat-tempat yang sudah ditumbuhi tinggi rumput-rumput liar yang cukup mengganggu keindahan dan estetika kota. - Sopir Fukuda Sampah masuk kedalam lorong-lorong atau gang-gang untuk menjemput sampah rumah tangga yang sudah dikemas dalam kantong setelah masyarakat telah melakukan

	<p>pemilahan sampah lalu sampah tersebut segera dibongkar di terminal sampah untuk diangkut keatas mobil duntruck dan mobil tangkasaki untuk kemudian dilanjutkan ke Tempat pembuangan akhir (TPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobil Tangkasaki dan Mobil Duntruck menjemput sampah diruas-ruas jalan protokol dan jalan penghubung lalu mengambil sampah yang dijemput melalui motor fukuda untuk segera dilanjutkan sampai ke pembuangan akhir TPA - Kehadiran Bank Sampah unit dikelurahan-kelurahan cukup membantu dalam hal mengurangi volume sampah diangkut, karna sampah rumah tangga hasil pemilahan bisa dibawa ke Bank Sampah yang kemudian dapat bernilai ekonomis.
Peneliti	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi?
Informan	Kita memiliki pengawas internal sebanyak 2 orang yang khusus menangani penyapu jalan dan motor sampah fukuda disamping diharapkan peran pemerintah kelurahan dibawa untuk turut andil dalam melakukan membantu pengawasan kerja para petugas kebersihan dan terkadang juga kami menerima langsung pengaduan masyarakat bilamana masih terdapat sampah yang belum diangkut oleh petugas kami.
Peneliti	Untuk peningkatan kinerja pegawai dilingkup pengelolaan persampahan, strategi apa yang dilakukan?
Informan	Selain saleri / gaji yang cukup, juga operasional yang cukup ditujukan untuk menopang hidup para anggota kebersihan kami, kita juga kadang melakukan anjangsana ketempat kerjanya memberi motivasi dan juga setiap waktu melakukan evaluasi melalui rapat rutin tiap bulan untuk mendengarkan keluhan serta kendala yang dihadapinya.

Informan 3

Nama Informan : AS

Tanggal : 08 Juli 2020

Tempat Wawancara : Ruang Lurah Tabaringan

	Topik Wawancara
Peneliti	Perencanaan apa yang dipersiapkan dalam Penanganan Masalah Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah?
Informan	Harapan saya dalam hal perekrutan anggota satgas kebersihan baik untuk penyapu maupun fukuda diserahkan sepenuhnya kepada Lurah masing-masing agar mereka mudah di evaluasi dan gampang ketika mereka dibutuhkan dilapangan, tentunya pelaksanaan yang baik dilapangan diawali dengan perencanaan yang terukur.

Peneliti	Bagaimana pola pengorganisasian penanganan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah?
Informan	Dibutuhkan tambahan pengawas dimasing-masing kelurahan agar lebih efektif dalam melaksanakan kerja-kerja satgas dilapangan, Kasi kebersihan di kelurahan juga banyak yang kosong ini semua tentu mempengaruhi performance organisasi dalam penanganan masalah persampahan sehingga ini harus menjadi perhatian kita semua untuk segera memperbaiki system pengorganisasian dalam hal penanganan sampah di Kecamatan Ujung Tanah
Peneliti	Seperti apa pelaksanaan penanganan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah?
Informan	Sudah berjalan baik, Penyapu, Fukuda, Mobil Sampah sudah cukup bagus dalam pelaksanaan tugasnya hanya perlu penyesuaian waktu kerja dengan waktu aktivitas masyarakat dan memperhatikan juga perintah-perintah dari Lurah setempat.
Peneliti	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi?
Informan	Pekerja harus diawasi kehadiran dan kinerjanya agar bisa berjalan maksimal sehingga bentuk-bentuk pengawasan dilakukan dengan mengedepankan perbaikan-perbaikan yang lebih baik kedepannya, meski dipahami bahwa sesuatu pekerjaan itu diawasi saja belum tentu menghasilkan sesuatu yang maksimal apalagi jika tidak dilakukan.
Peneliti	Untuk peningkatan kinerja pegawai dilingkup pengelolaan persampahan, strategi apa yang dilakukan?
Informan	Tentunya kita selalu memperjuangkan nasibnya, kelayakan penghasilannya dan perbaikan derajat kesehatannya semua kita perhatikan disamping pendekatan kekeluargaan dan sesekali memberi motivasi dan wejangan untuk kebaikan dan kehidupannya sehingga ini semua diharapkan dapat memacu dan memicu peningkatan kinerja mereka.

D. Informan Triangulasi 1

Nama Informan : HM

Tanggal : 10 Juli 2020

Tempat Wawancara : Rumah Tokoh Masyarakat (Ketua RW)

	Topik Wawancara
Peneliti	Bagaimana Bapak/Ibu melihat aktivitas penanganan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah ?
Informan	Sudah berjalan baik tawwa, kita itu pagi-pagi habis sholat subuh bawa sampah keluar rumah dan tidak lama kemudian langsung disambar oleh petugas fukuda, ada juga sebagian kami pisahkan yang bernilai ekonomis itu kami bawa timbang ke Bank Sampah terdekat dan hampir setiap hari sampah kami tidak ada yang tersisa, kita juga sering melaksanakan kerja bakti dilingkungan masing-

	masing dan armada sampah dari Kecamatan selalu siap saat terjadi penumpukan sampah sisa hasil kerja bakti warga, sehingga kami merasa puas atas segala bentuk pelayanan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah.
Peneliti	Apakah Bapak/Ibu turut terlibat dalam pengawasan masalah persampahan di Kecamatan Ujung Tanah
Informan	Iya sudah pasti, karna terkadang juga terjadi keterlambatan penjemputan sampah tentu ini segera kami laporkan ke Pihak Kelurahan dan langsung ditindaklanjuti juga biasa ada penumpukan sampah atau sampah yang berhamburan itu juga kami biasa laporkan tapi penanganannya cepat karna pihak kebersihan selalu cepat tanggap saat dikonfirmasi, artinya kami pun terlibat dalam hal pengawasan dan bahkan biasa dimintai pendapat oleh pak Lurah atau pak Camat perihal kinerja mereka yang melakukan penjemputan sampah, penyapu dan mobil tangkasaki.
Peneliti	Upaya apa yang Bapak/Ibu turut lakukan dalam hal penanganan sampah di wilayah tempat tinggal nya ?
Informan	Dibantu tong tawwa petugas kebersihan dengan kita ini pandai-pandai melakukan pengemasan sampah, ya paling tidak sudah dikantongin saat dibawa keluar rumah supaya tidak berhamburan dan senantiasa menyampaikan ke warga tentang pentingnya kita sadar kebersihan lingkungan supaya persoalan sampah itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi yang pokok kita ini warga kota harus sadar tentang persoalan sampah ini ditambah lagi keterlibatan kita dalam program Bank Sampah ini juga tujuannya sangat berguna untuk mengurangi sedikit volume sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan dan menjadi tambahan pundi-pundi penghasilan, yah paling tidak bisa menutupi uang listrik dalam sebulan kang jadi ringan toh persoalannya hanya dengan memilah sampah saja untuk dibawa ke Bank Sampah terdekat.

Informan Triangulasi 2

Nama Informan : SA

Tanggal : 11 Juli 2020

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Rumah Tangga

	Topik Wawancara
Peneliti	Bagaimana Ibu melihat aktivitas penanganan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah ?
Informan	Sudah optimal pak, saya hampir tidak ada masalah dengan sampah oleh karena dua kali sehari sampah saya diangkut oleh petugas motor fukuda lalu saya hanya ada kewajiban membayar retribusi sampah sebesar Rp. 16.000 per bulan bagi saya ini sudah sederhana dan tidak memberatkan, Pak RT dan Pak RW setempat juga selalu monitor sampah warga jadi klo ada masalah disampaikan saja sama

	beliau nanti dia yang meneruskan.
Peneliti	Apakah Ibu turut terlibat dalam pengawasan masalah persampahan di Kecamatan Ujung Tanah
Informan	Tidak terlibat langsung, Cuma menyampaikan saja jika ada kendala sama pak RT atau pak RW, beliau lah yang meneruskan terus kami juga tiap melihat langsung tawwa bagaimana itu aktivitas nya petugas kebersihan bekerja sungguh saya senang melihat kondisi ini, semoga dapat dipertahankan. Wajar tommy tawwa kalo Makassar raih itu piala Adipura.
Peneliti	Upaya apa yang Ibu turut lakukan dalam hal penanganan sampah di wilayah tempat tinggal nya ?
Informan	Paling melibatkan diri klo ada kerja bakti bersama ibu-ibu yang lain lalu kita juga melakukan pemisahan sampah basah dan sampah kering juga sampah plastic, botol-botol, kaleng dan lain-lain lalu yang masih bisa dimanfaatkan kami pakai, tapi yang sudah tidak bisa itu yang kami timbang di Bank Sampah selebihnya dikemas lalu dibuang ke tempat sampah itulah kemudian yang diangkut oleh petugas sampah.

Informan Triangulasi 3

Nama Informan :
Tanggal : 12 Juli 2020
Tempat Wawancara : Kantor Camat (Pengawas Kebersihan)

	Topik Wawancara
Peneliti	Bagaimana Proses perencanaan penanganan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah ?
Informan	Diawali dengan rapat-rapat persiapan secara teknis, dimana disitu dijelaskan siapa-siapa yang bertugas untuk kegiatan ini dengan rute kerja masing-masing lalu penjelasan-penjelasan terkait teknis kerja masing-masing, seperti itu awalnya sebelum mereka melakukan kerjanya dilapangan.
Peneliti	Seperti apa struktur organisasi di bagian pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah ?
Informan	Perintah itu satu dari Camat lalu Kasi Kebersihan dan Lurah setempat, kami ini turut andil di pengawasan lalu struktur terbawah itumi teman-teman satuan tugas kebersihan Kecamatan Ujung Tanah.
Peneliti	Bagaimana selama ini pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah ?
Informan	Kalau kita semua berpedoman pada petunjuk pimpinan, saya kira tidak ada masalah, jadi kita bekerja saja sesuai standar operasional prosedur nya dan Alhamdulillah pelaksanaan selama ini cukup berjalan dengan baik.
Peneliti	Bagaimana Bapak/Ibu dalam melakukan pengawasan atau control pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan di Kecamatan

	Ujung Tanah ?
Informan	Turun langsung kelapangan memantau kerja teman-teman satgas bilamana terdapat kekeliruan pada saat bekerja kami tak sungkan-sungkan langsung menegur, kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak kelurahan jika ada kami dapatkan keluhan dari masyarakat perihal penanganan sampahnya.
Peneliti	Apa yang dilakukan dalam rangka strategi peningkatan kinerja pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah ?
Informan	Berjuang bersama-sama untuk perbaikan kesejahteraan dan juga membangun kedekatan emosional kepada mereka sehingga terbangun situasional dimana kita merasa saling membutuhkan dan satu arah satu tujuan untuk memudahkan kerja-kerja team dilapangan kita bangun kebersamaan itu.

Informan Triangulasi 4

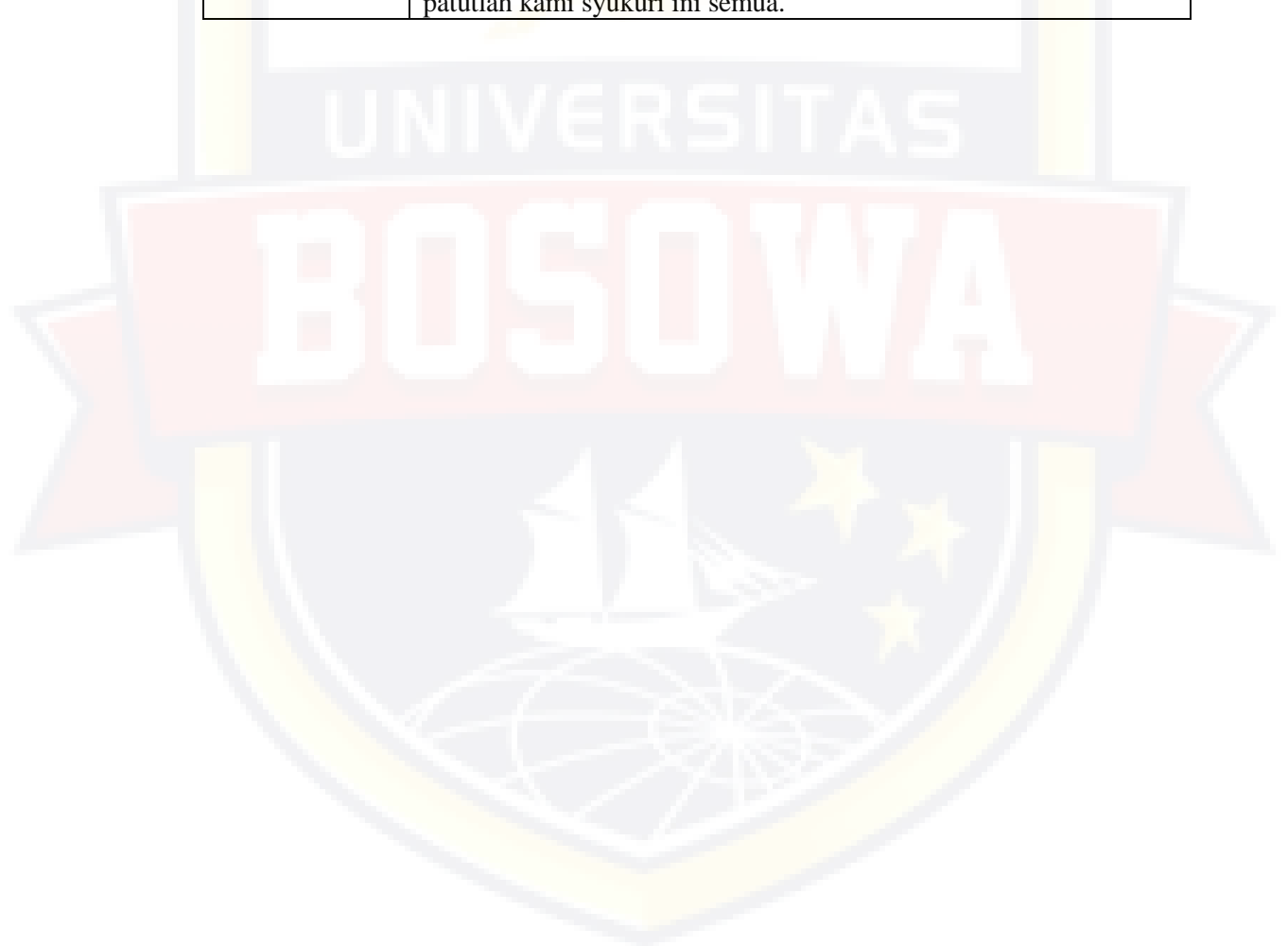
Nama Informan :

Tanggal : 13 Juli 2020

Tempat Wawancara : Halte Sampah (Petugas Kebersihan)

	Topik Wawancara
Peneliti	Seperti apa struktur organisasi yang saudara ketahui di bagian pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah ?
Informan	Iye kami petugas ada yang namanya pengawas kebersihan lalu ada kepalanya namanya pak Kasi Kebersihan dan pejabatnya ada Lurah ditempat kita bekerja dan ada Camat sebagai pimpinan teratas kami, sudah jelas strukturanya.
Peneliti	Bagaimana selama ini pelaksanaan kebijakan pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah ?
Informan	Iyee, kami begini setiap hari kerja mengangkut sampah warga terus yang lainnya ada yang menyapu jalan, ada penyiram tanaman, ada yang kerjanya potong rumput dan ada juga mobil sampah yang tiap hari mengangkut sampah ke TPA Antang, kita kerjakan semua dengan berpedoman ikhlas dan Alhamdulillah banyak juga orang yang mau bergabung tapi tidak bisa karna terbatas personel, jadi semua patut kami syukuri artinya klo bicara pelaksanaan hampir tidak ada kendala karna sudah berjalan sebagaimana yang sudah dibicarakan dan direncanakan lebih awal.
Peneliti	Bagaimana Bapak/Ibu dalam melihat bentuk pengawasan atau control pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah ?
Informan	Setiap hari kami dipantau oleh Bapak pengawas kebersihan begitupun juga pak Lurah beserta staff nya karna wajar tawwa warganya rajin membayar retribusi sampah jadi kita juga harus rajin jemput sampahnya setiap hari, pagi dan sore bahkan terkadang

	<p>pak Camat sendiri turun langsung pantau kerja-kerja kita jadi kalau berbicara pengawasan sudah sangat bagus ketat berjalan dan banyak pihak yang berkepentingan memantau dan mengevaluasi kerja-kerja kita jadi tidak ada lagi alasan mau bermalas-malasan.</p>
Peneliti	<p>Agar kinerja teman-teman yang terlibat dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah berjalan baik, apa yang mesti dilakukan ?</p>
Informan	<p>Alhamdulillah kalau gaji sudah cukup memuaskan ditambah lagi sudah kita dapat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini semua patut kami syukuri dengan memperlihatkan kinerja yang baik, apa tong mami kita mau malas kalau kesejahteraan sudah cukup baik ditambah biaya operasional kita juga ditunjang, kalau saya sih bersyukur atas ini semua karna juga banyak yang mau bekerja begini tapi tidak diterima karna sudah cukup kita personenya jadi patutlah kami syukuri ini semua.</p>



DOKUMENTASI

- Kantor Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar



- Wawancara dengan Informan







DATA VOLUME SAMPAH



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN UJUNG TANAH



Sekretariat : Jl Sabutung Timur No : 200 Tlp: 0411-8940011 Kode pos 90161 Makassar

**DATA BULANAN REKAPITULASI VOLUME SAMPAH MOBIL DUMBUK
KECAMATAN UJUNG TANAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020**

No	Nama Kelurahan	Bulan : <i>Juli</i> Tahun : 2020				Ket
		MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	
1	UJUNG TANAH	875	880	750	760	3,265
2	TAMALABBA	950	850	960	970	3,730
3	TABARINGAN	1,950	1,780	2,190	1,850	7,77
4	TOTAKA	990	1,190	980	1,070	1,972
5	PATtingalloang	1,440	1,290	1,410	1,540	5,68
6	GUSUNG	1,400	1,720	1,730	1,860	6,71
7	PATtingalloang BARU	850	1,800	555	850	2,256
8	CAMBA BERUA	1,760	1,940	1,750	1,850	7,30
9	CAMBAYYA	1,740	1,290	2,580	1,770	7,38
	Jumlah	3,673	1,741	5,002	3,658	46,063

DAMTRUK/TONGKANG *Jadi jumlah total = Minggu I-IV 14,074 + 46,063 = 60,137 tm*

No	Nama Kelurahan	Bulan : <i>Juli</i> Tahun : 2020				Ket
		MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	
1	SUKRI / RAHMAN B.9314.BDD	1,910	1,960	1,890	1,760	7,52
2	HASAN	2,180	2,070	2,270	2,280	8,80
3	RAJAMUDDIN DD.9235.A	1,070	1,450	1,860	1,750	6,13
4	HALIM DD.9221.AB	439	436	462	583	1,920
5	RUSLI(CHOKI)	1,150	1,980	1,090	1,990	1,095
	Jumlah	445,3	443,46	469,11	590,78	25,46

Catatan:
 $= 1,948$
 jumlah total = $25,465 + 1,948 =$
 $= 27,413 tm$

Makassar, 2020
 Mengetahui:
 Kasi kebersihan

 ABDUL HARIS, S.Sos



**DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS KEBERSIHAN
KECAMATAN UJUNG TANAH TAHUN 2020**



NO	N A M A	N I K	A L A M A T	PETUGAS	TANDA TANGAN
1	AMIR	7371080107710002	Jl. Barukang VI	Penyapu	
2	ANSAR	7371083107930001	Jl. Sabutung Lama	Penyapu	
3	AKMAL SALIM	7371090204700007	Jl. Ujung Bori Komp	Penyapu	
4	ANTO SARAILA	7371085012740002	Jl. Urip Sumiharjo	Penyapu	
5	ANDI HAMILUDDIN	737108109770001	Jl. Satando Komp AL	Penyapu	
6	BARLIAN JAMALUDDIN	7371092707920017	Jl. Urip Sumoharjo	Penyapu	
7	BARRUNG PARERA	7371084207600003	Jl. Sabutung I No 5	Penyapu	
8	HASNIA	7371085910790004	Jl. Sabutung	Penyapu	
9	HASMAWATI	7371087112710061	Jl. Barukang Utara	Penyapu	
10	TALLASA	7371085609780002	Jl. Barukang Utara	Penyapu	
11	SYAHRIATI	7371086301740004	Jl. Barukang VI	Penyapu	
12	INDRIASARI	7371045202770002	Jl. Gunung Merapi	Penyapu	
13	LANTORO	7371083009820004	Jl.Sabutung Baru	Penyapu	
14	MARYAM	7371085511830001	Jl. Barukang II Kanal	Penyapu	
15	NORO	7371083112720100	Jl. Barukang Utara	Penyapu	
16	ANWAR	7371142312830009	Jl. Barukang 3	Penyapu	
17	FAHMI ISHAK	7371081606950001	Jl. Kalimantan	Penyapu	
18	RIA AMATIA	7371094612830008	Jl.Sabutung Timur	Penyapu	
19	RAODAH	7371074709700009	Jl. Barukang Utara	Penyapu	
20	RABANIA	7371084102740001	Jl. Sabutung Timur	Penyapu	
21	RAHMIATI	7371086805750001	Jl. Kalimantan	Penyapu	
22	RUSLI	7371080308790002	Jl. Cakalang I	Penyapu	
23	ASRIANTY	7371136812760010	Jl. Sabutung Timur	Penyapu	
24	SYAHARINA	7371084502820002	Jl. Barukang VI	Penyapu	
25	SYAHYATANG	7371085003770004	Jl.Masjid Nurul Jihad	Penyapu	
26	ASHARI	7371080307800003	Jl. Sabutung Timur	Penyapu	
27	MASJIDIN	7312061210950002	Jl. Kesadaran IV	Penyapu	
28	SAKKING	7371096109740010	Jl. Kesadaran IV	Penyapu	
29	SIJA	7371091208760015	Jl. Kesadaran IV	Penyapu	
30	JAMALUDDIN DG NOMPO	7371081405690003	Jl. Barukang 6 No.25	Penyapu	
31	TINA	7371081706780002	Jl.Pondok Kasi	Penyapu	
32	MIRNAWATI	7371085110900003	Jl. Sabutung Timur	Penyapu	
33	HASRIANI	7371086404680004	Jl. Barukang Utara	Penyapu	Nama tdk Lengkap
34	SURYANI	7604015005750007	Jl. Sabutung	Penyapu	
35	JUMARNI	7371084205800003	Jl. Barukang Utara	Penyapu	
36	SYAIFULLAH	7371092603970007	Jl. Tanjung Bayang	Penyapu	Blm ada kartu
37	SYAHRIL USMAN	7371082402790002	Jl. Sabutung Timur	Penyapu	

38	MUH.IRFANDI	7371080806970002	Jl. Barukang VI	Fukuda	
39	SYARIFUDDIN ARAS	7371080507840002	Jl. Pondok Kasih	Fukuda	
40	ABD.RAUF SIAMA	7371080401660004	Jl. Tarakan	Fukuda	
41	HALIDE	7371082701640001	Jl. Sabutung	Fukuda	
42	AKBAR	7371080202810007	Jl. Sabutung Timur	Fukuda	
43	ARIFUDDIN	7371080310740002	Jl. Barukang VI	Fukuda	
44	BAKRI	7371081907810002	Jl. Barukang Utara	Fukuda	
45	BURHANUDDIN	7371040110730003	Jl. Gunung Merapi Lr 81	Fukuda	
46	MAKMUR	7371080703620004	Jl. Sabutung Timur	Fukuda	
47	AMBO RAPPE	7306081809610001	Jl. Barukang no.10A	Fukuda	
48	ARISYANDI	7371081101950001	Jl. Sabutung Baru	Fukuda	
49	YUYUN S RABIASA	7371081703860006	Jl. Sabutung Timur	Fukuda	
50	SAMPARA	7371080107670004	Jl. Barukang Utara	Fukuda	
51	MANSUR AB	7371081010800010	Jl. Barukang VI	Fukuda	Kontrak
52	H.ISMAIL CACO	7371083112590006	Jl. Bolu	Fukuda	
53	ZAINUDDIN	7371080705670001	Jl. Barukang I No 19	Fukuda	
54	SAIFUDDIN	7371080707630003	Jl. Bolu	Fukuda	
55	HAEDAR	7371080506840001	Jl. Sabutung Timur	Fukuda	
56	M.SYUKUR	7371081505780002	Jl. Barukang VI	Fukuda	
57	H.ILYAS	7371080607690002	Jl. Bolu No 15	Fukuda	
58	ASRA	7371080507800009	Jl. Sabutung	Fukuda	
59	H.ABSAR	7371080303640002	Jl. Sabutung No. 120 A	Fukuda	Blm ada kartu
60	MUHAMMAD ASRUL	7371082704750003	Jl. Barukang Utara	Fukuda	
61	ARSYAK	7371081708740006	Jl. Barukang VI	Fukuda	
62	ISHAK	7371080708690001	Jl. Sanani No. 7	Fukuda	
63	ARIFIN	7371082105720001	Jl. Sabutung Timur	Fukuda	
64	SIKRULLAH	7371082910740001	Jl. Barukang VI	Fukuda	
65	SYAHRUL	7371080712770005	Jl. Barukang VI	Fukuda	
66	SAIFUL	7371081807880002	Jl. Barukang VI	Fukuda	
67	BACHTIAR	7371082508700001	Jl. Barukang Utara	Fukuda	
68	WAHYUDDIN	7371086004470002	Jl.Sabutung Timur	Fukuda	
69	KAMARUDDIN DG NAI	7371081103500001	Jl. Barukang Utara Lr 6	Fukuda	
70	MUH. RASUL	7371081510010002	Jl. Masjid Nurul Jihad	Fukuda	
71	ABD.RAUF SIAMA	7371080401660006	Jl.Tarakan	Fukuda	Blm ada kartu
72	SUNIL MUHADI	7371083112730063	Jl.Barukang Utara Lr 11	Fukuda	
73	SUARDI	7371082908880002	Jl. Barukang Utara	Fukuda	
74	NUR RAMADANI	7371080501990001	Jl. Sabutung Baru II	Fukuda	
75	FAISAL	7371081206940001	Jl. Sabutung Baru	Fukuda	
76	ISKANDAR	7371083112710035	Jl. Pondok Kasih	Fukuda	
77	MUKHTAR MUTTI	7371081706780002	Jl.Barukang Utara	Fukuda	
78	LUKMAN	7371082312790001	Jl.Sabutung	Fukuda	
79	AHMAD	7371080606880004	Jl. Barukang VI	Fukuda	
80	SAINUDDIN	7371073112600041	Jl. Galangan kapal	Taman	Kontrak
81	MUSTARI	7371081204810006	Jl. Sabutung No. 145	Fukuda	
82	ISMAIL RACHIM	7371080508870001	Jl. Barukang Utara	Fukuda	Nama tdk lengkap
83	AHMAD MUHTAR	7371080201830006	Jl. Sabutung Timur 127	Fukuda	
84	MUH. BASIR	7371070610810001	Jl. Sabutung Timur rt 02	Fukuda	
85	SAINUDDIN	7371073112600041	Jl. Galang kapal	Pet Taman	
86	HERIYANTO	7306073808890006	Pallangga	Sopir	
87	RUSLI	7371041707900001	Timbuseng	Awak	
88	ASRANDI	7307081004950001	Tellu Limpoe	Awak	
89	YUSRAN	7371122303920008	Jl. Mesjid Nurul Hidayah	Sopir	
90	AMRAN	7307082303960001	Jl. Mesjid Nurul Hidayah	Awak	
91	RESA	73	Jl.	Awak	
92	ARIEF	7371122507910006	Jl. Masjid Nurul Hidaya	Sopir	
93	AMRI	7371122507910006	Jl. Masjid Nurul Hidayah	Awak	

95	ILHAM EFENDI	7371082810960001	Jl. Sabutung Timur	Sopir	
96	SAMPARA	7371083112670055	Jl. Barukang Utara Lr 6	Awak	
97	JUMADI	7371080307980005	Jl. Bolu 15	Awak	
98	M.RUSLI	7371121303820004	Jl. Mesjid Nurul Hidayah	Sopir	
99	RUSDI DG SARRO	7306121907840001	Jl. Biring Romang	Awak	
100	SAHARUDDIN B	7371120902880003	Jl. Rahmatullah Raya	Awak	
101	ADHITYA FAJAR	7371120706880001	Jl.Nurul Hidaya	Sopir	
102	FERIYANDI	7371121612920004	Jl.Nurul Hidaya	Awak	
103	FAJARULLAH AB	7371122302940002	Jl.Tamangapa	Awak	
104	AMBO	7371070312760007	Jl. Galangan Kapal	Sopir	Blm ada kartu
105	M.SYARIFUDDIN	7371080303740002	Jl. Da'wah	Awak	
106	ALIMUDDIN	7371080912760002	Jl. Sabutung Timur	Awak	
107	BULUDDIN TOMPO	7306061708800007	Songkolia Bonto Gowa	Sopir	
108	ARIYANTI	7306064510860002	Songkolia Bonto Gowa	Awak	
109	NASHRULLAH	7306061303990001	Timbuseng	Awak	
110	KAHARUDDIN	7371120110900012	Jl.Rahmatullah	Sopir	
111	FAISAL	7371120603198005	Romang Tanggaya	Awak	Blm ada kartu
112	DG.SATOLLA	7371120507580008	Jl. Masjid Nurul Hidayah	Awak	Blmada kartu *
113	SAMPARA	7371081212760009	Jl.Sabutung Timur	Sopir	
114	SANDI	7371121709850010	Jl. Borong Jambu 2	Awak	
115	RUDY	7371123112740057		Awak	
116	HUSAIN	7371083112600019	Jl. Sabutung Timur	Sopir	
117	M.UMAR	7371082404860001	Jl. Sabutung Timur	Awak	
118	AMIRUDDIN	7371080303740002	Jl. Sabutung Timur	Awak	
119	RAMLI	7371122005920009	Jl. Tamangapa	Sopir	
120	B.DG. SIKKI	7371120510750014	Jl.Rahmatullah Raya	Awak	
121	RUSTAM DG RANI	7306060411860002	Jl.Kampung Lette	Awak	
122	ABD.HALIM	7371123112740048	Jl.Masjid Baiturrahman	Sopir	Pns
123	KAMARUDDIN	7371121511810014	Jl. Masjid Nurul Hidaya	Awak	Pns
124	MUH. ANSAR	7371123012820003	Jl. Baiturrahman	Awak	Pns
125	RAJAMUDDIN T	7371120809700004	Jl.Inspeksi Kanal	Sopir	Kontrak
126	GUNAWAN SAPUTRA	7304073012830004	Jl.Borong Raya	Awak	
127	IRFAN	7304073012830004	Jl.Borong Raya	Awak	Kontrak
128	ABD.RAHMAN	7371122102930001	Jl. Dg Hayo	Sopir	Kontrak
129	SYUKRI	7371121212900007	Jl. Rahmatullah	Sopir	
130	MUKTAR DG NGOLA	7371121107760007		Awak	Blm ada kartu
131	FAJAR PARAWANSYAH	7371120609920003	Jl. Masjid Baiturrahman	Sopir	Kontrak
132	MITRA HB	7371081804850001	Jl. Sabutung Baru	Sopir	
133	FEBY	7371080902810003	Jl. Barukang Utara	Awak	
134	FAJRIN	7371081010830001	Jl. Sabutung Baru	Awak	
135	MUH HASTANG	7371080907800004	Jl. Kande	Penyiram	
136	SUPARDI	7371083108840003	Jl. Sabutung Timur Lr 2	Awak	
137	M.KADRI	7371080606850005	Jl.Sabutung Timur	Awak	Nominal kurang
138	RUSDI EROS	7371032903690004	Jl. Kesatuan	Pet Rumput	Kontrak
139	KAHARUDDIN J	7371081505980004	Jl. Bolu	P.Rumput	
140	ASIR ALI	7371081204670002	Jl. Barukang VI	Pengawas	Kontrak
141	M.AMIN USMAN	7371101403630003	Jl. Sabutung Timur Lr 2	Pengawas	Kontrak
141	TUJUARDI	7371081505680001	Jl. Barukang Utara	Pengawas	
142	NASRAWATI	7371085107770005	Jl. Barukang VI	Staf	Kontrak

Catatan : A/N Musa digantikan oleh Faisal No. 111
- Jamaluddin digantikan oleh Resa No. 91

Makassar, Juni 2020
Kasi Kebersihan

ABDUL HARIS, S.SO.s
Danakat - Danata Tk I



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN UJUNG TANAH

Sekretariat : JL.Sabutung Timur No.200 Tlp : (0411) 8940011 Kode Pos : 90161 Makassar

DAFTAR ARMADA DAN PERALATAN PERSAMPAHAN
KECAMATAN UJUNG TANAH TAHUN 2020

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Ketr.
1.	Mobil Tangkasaki	9 Unit	
2.	Truk	5 Unit	
3.	Arm Roll	3 Unit	
4.	Motor Pengangkut Sampah / Fukuda	54 Unit	
5.	Kontainer Sampah	4 Unit	
6.	Fukuda Penyiram	2 Unit	
7.	Tempat Sampah Beroda Dua	40 Unit	
8.	Gerobak Sampah / Gerobak Celeng	40 Unit	
9.	Penyapu Jalan	30 Orang	
10.	Mesin Pemotong Rumput	6 Unit	
11.	Mesin Senso / Mesin Pemotong	4 Unit	
12.	Satgas Genangan / Kebersihan	30 Orang	



Makassar, 30 Juni 2020
a.n. CAMAT UJUNG TANAH
Kasi Kebersihan

ABDUL HARIS, S.Sos
Pangkat : Penata Tk. I
NIP.19750510 200502 1 007

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI :

Nama : SAPARUDDIN. I
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang/ 29 Juli 1979
Jenis Kelamin:Laki – Laki
Agama : Islam
Suku : Bugis-Makassar
Status Pernikahan : Menikah
Alamat Rumah : Villa Mutiara Hijau XI No.22 Makassar
Kontak Person : 085 343 980 606

DATA KELUARGA :

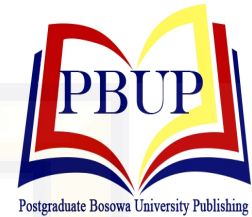
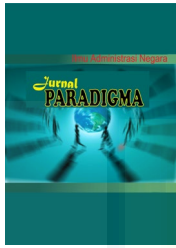
Bapak : Dg. Ismail. T
Ibu : Almarhumah Dg. Saripah
Anak ke : Duadari Tujuh Bersaudara

DATA PENDIDIKAN :

Sekolah Dasar : SD Inp. Pannampu II Tahun1991
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 22 Makassar Tahun 1994
Sekolah Menengah Atas : SMUN 4 Makassar Tahun 1997
Strata - I : Universitas Indonesia Timur (UIT)

DATA PEKERJAAN :

1. CPNS Pemkot Makassar Tahun 2014-2015.
2. PNS Pemerintah Kota Makassar Tahun 2016.
3. Sekretaris Lurah Totaka Tahun 2019



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

Saparuddin. I¹, Juharni², Nurkaidah³

¹ Ujung Tanah, Persampahan, Strategi Penanggulangan Sampah

Email:saparuddinismail141@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; xx-xx

Revised:xx-xx

Accepted;xx-xx

Abstrak. This research was conducted in Ujung Tanah District, Makassar City in June-July 2020. The approach in this study used a qualitative descriptive based on the phenomenology that occurred. Data collection techniques through observation, in-depth interviews, and literature study. The objectives of this research are: (1) To find out how the management function is applied in handling solid waste; and (2) To find out the strategies carried out by the Ujung Tanah Subdistrict government in improving employee performance in overcoming solid waste. The results showed that: (1) Solid waste management in Ujung Tanah District, Makassar City in terms of planning aspect (planning) is optimal. The indicators used to assess these aspects include the availability of data on the volume of community waste, data on facilities and infrastructure / fleets owned, and data on cleanliness officers / task forces (resources), so that what will be planned is ready then to carry out activities / technical program related to solid waste management in Ujung Tanah District. Solid Waste Management in Ujung Tanah Subdistrict, Makassar City in terms of organizing aspects is not optimal. The indicators used to assess this aspect are the availability of a solid waste management organizational structure, and the division of tasks for solid waste management already exists, but currently in Ujung Tanah District technically it still requires human resources from direct field supervisors and staff, bearing in mind 3 field supervisors. it is considered insufficient to cover 9 sub-districts which should also have 9 supervisors in each sub-district, as well as the absence of an executive staple in the sub-district cleanliness management division, which sometimes makes it difficult for section heads and supervisors to carry out general administration. (2) Solid waste management in Ujung Tanah District, Makassar City in terms of actuating is optimal. The indicator used to assess this aspect is the implementation of good waste management, the process starting from sorting household waste to picking up community waste both on roads and alleys, then the process of loading and unloading waste at the district garbage terminal that is owned is running well

Until then, the waste is transported to the TPA (final disposal site). Solid Waste Management in Ujung Tanah District, Makassar City in terms of controlling aspects is optimal. The indicators used to assess these aspects are internal supervision and external supervision that have been running, supervision of the implementation of waste management in the community internally is carried out by the sub-district sanitation supervisor together with the sub-district leadership elements and the local village government who also take part in carrying out internal supervision, while external supervision sometimes complaints. This is done directly by the community itself whenever they find trash that is not transported either at home or that sometimes they find on roads.

Abstrak. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada bulan Juni-Juli 2020. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif berdasarkan fenomenologi yang terjadi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana penerapan fungsi manajemen dalam penanganan persampahan; dan (2) Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Ujung Tanah dalam meningkatkan kinerja pegawai mengatasi persampahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ditinjau dari aspek perencanaan (*planning*) sudah optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut antara lain ketersediaan data volume sampah masyarakat, data sarana dan prasarana / armada yang dimiliki, dan data petugas / satgas kebersihan (sumber daya) yang dimiliki, sehingga apa yang akan direncanakan sudah siap kemudian untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan / program teknis terkait pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah. Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ditinjau dari aspek pengorganisasian (*organizing*) belum optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut yaitu ketersediaan struktur organisasi pengelolaan persampahan, dan pembagian tugas pengelolaan persampahan memang sudah ada, namun saat ini di Kecamatan Ujung Tanah secara teknis masih membutuhkan sumber daya manusia dari unsur pengawas lapangan dan staf, mengingat 3 orang pengawas lapangan dianggap tidak cukup mencakup 9 Kelurahan yang semestinya juga memiliki pengawas berjumlah 9 orang dimasing-masing Kelurahan, begitupun ketiadaan staf pelaksana dibagian pengelolaan kebersihan kecamatan membuat kadang kepala seksi dan pengawas kesulitan dalam hal pelaksanaan pengadministrasian umum. (2) Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ditinjau dari aspek pelaksanaan (*actuating*) sudah optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut yaitu berjalannya pengelolaan sampah dengan baik proses mulai dari pemilahan sampah rumah tangga lalu penjemputan sampah masyarakat baik diruas-ruas jalan maupun dilorong-lorong / gang, kemudian proses bongkar muat sampah di terminal sampah kecamatan yang dimiliki berjalan dengan baik, sampai kemudian sampah tersebut diangkut sampai ke TPA (tempat

pembuangan akhir), Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ditinjau dari aspek pengawasan (*controlling*) sudah optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern sudah berjalan, pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dimasyarakat secara intern dilakukan oleh pengawas kebersihan kecamatan bersama unsur pimpinan kecamatan dan Pemerintah Kelurahan setempat pun turut andil dalam melaksanakan pengawasan intern, sedangkan pengawasan secara ekstern kadang pengaduan langsung dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bilamana mereka menemukan sampah yang tidak terangkut baik dirumah tangga maupun yang terkadang mereka temukan diruas-ruas jalan.

Keywords:

*Ujung Tanah;
Garbage; Waste
Management
Strategy*

Corresponden author:

Email: xxxx@gmail.com



artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY -4.0

PENDAHULUAN

Sampah adalah semua jenis benda atau barang bangunan/kotoran manusia,hewan, atau tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dari aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat menimbulkan dan atau mengakibatkan pengotoran terhadap air, tanah dan udara sehingga dapat menimbulkan pengrusakan lingkungan hidup manusia (R, Soemandi, 2008 : 37).

Pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Berbagai kendala masih dihadapi dalam melaksanakan pengelolaan sampah tersebut baik kendala ekonomi, sosial budaya maupun penerapan teknologi. Permasalahan dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan.

Sumber permasalahan sampah yang hadir mulai dari titik awal produksi sampah yakni rumah tangga, pengangkutan sampah rumah tangga dilorong-lorong sampai di tempat pembuangan akhir sampah (TPA) menjadi persoalan utama pengelolaan sampah yang ada di Kota Makassar.

Berikut beberapa faktor penyebab penumpukan sampah yaitu: (1) Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya – jarak TPA dan pusat sampah relative jauh sehingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif; (2) Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah. Sisa sampah di TPS berpotensi menjadi tumpukan sampah; (3) Teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga lambat membusuk; (4) Tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah. Masyarakat sering membuang sampah di sembarang tempat sebagai jalan pintas; (5) Kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah serta produknya. Minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan sampah secara tepat; dan (6) Manajemen sampah tidak efektif. Selanjutnya masalah yang sering timbul dalam penanganan sampah adalah tingginya tingkat pencemaran yang berasal dari sampah rumah tangga, pasar, rumah sakit, sekolah dan tempat – tempat umum lainnya.

Tingginya tingkat pencemaran tersebut sebagai akibat makin padatnya penduduk dan makin meningkatnya aktivitas manusia sehingga volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat pula, sehingga terjadilah penumpukan sampah oleh karena volume sampah yang dapat diangkut dan dikelola tidak seimbang dengan volume produksi sampah.

Tentunya keadaan ini menimbulkan ketidaknyamanan pemandangan, menimbulkan bau tidak sedap, memperbesar timbulnya bahaya banjir pada saat musim hujan karna tersumbatnya saluran air / drainase kota serta dapat menjadi sumber penyakit. Menyatakan bahwa pengelolaan sampah di kota Makassar masih sangat buruk. Dengan tingkat produksi sampah 3.680 meter kubik (M^3) per hari, yang tertangani oleh Pemerintah Kecamatan hanya 3.270 meter M^3 sebanyak 410 M^3 lainnya tidak terangkut dan hanya menumpuk ditempat pembuangan sementara (TPS) sampah dan sebagiannya sudah dapat dikelola melalui program Bank Sampah dan Kerajinan-kerajinan kreatif dari daur ulang bahan sampah.

Berdasarkan data Dinas Kebersihan, di Kota Makassar dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa, setiap hari jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 3.680 m^3 per hari. Akan tetapi, sampah yang tertangani hanya 3.270 m^3 Dengan demikian, masih ada sekitar 410 m^3 sampah per hari yang tidak terkelola. Serta lambatnya pengangkutan sampah dari TPS ke TPA maupun pelayanan sampah dari rumah ke rumah karena jumlah armada pengangkut sampah masih sangat kurang, jumlah mobil pengangkut sampah hanya 139 unit padahal untuk mengangkut sampah 3.680 m^3 per hari idealnya dibutuhkan 250 unit. Sementara armada pengangkut sampah yang ada sekarang juga tidak berfungsi maksimal karena ada yang sudah tua dan sering rusak.

Dengan diambil alihnya pengelolaan persampahan oleh pihak kecamatan diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah yang kian meresahkan pada ruas-ruas jalan di kota Makassar. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang seharusnya diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dimana dalam hal ini jika pengelolaan retribusi persampahan berjalan dengan efektif maka bukan tidak mungkin Makassar bisa menjadi Kota Dunia yang sama-sama kita inginkan.

Hal ini membuat tugas baru bagi Camat di Kota Makassar sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan ini harus selesai pada akhir Desember 2016, ini juga dilakukan menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengharuskan struktur organisasi seluruh pemerintah daerah, baik kota maupun kabupaten untuk menyesuaikan dengan nomenklatur jajaran kementerian. Jadi bidang penataan kebersihan dan pertamanan akan dialihkan ke-14 Kecamatan di Kota Makassar termasuk pada Lokasi penelitian pada Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

Pada pelayanan persampahan di Kecamatan Ujung tanah pemerintah kota Makassar telah memberikan amanah dan kepercayaan pihak Kecamatan untuk mengelola pelayanan persampahannya masing-masing, adanya pelimpahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Tanah, Bertitik tolak pada proses pelaksanaan kebersihan Kota Makassar dalam mewujudkan Kota Makassar Tidak Rantasa (MTR),

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir pada hakekatnya pengertian kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan James E Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan public meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan oleh pemerintah. Pandangan lainnya dari kebijakan publik, melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.

2. Tahap-Tahap dalam Perumusan Kebijakan Publik

Tahap-tahap dalam perumusan kebijakan adalah:

- 1) Perumusan Masalah. Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan yang baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat.
- 2) Agenda Kebijakan. Tidak semua masalah publik akan masuk dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetensi antara satu dengan yang lainnya. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan.
- 3) Pemilihan alternative kebijakan untuk memecahkan masalah. Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut kedalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.
- 4) Penetapan Kebijakan. Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka paling akhir dalam pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan yang terbentuk berupa undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden, keputusan menteri dan lain sebagainya.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Webster dalam Wahab (1997:56) Implementasi kebijakan dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu). Jika pandangan ini ditelaah, maka implementasi dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Wheelen Dan Hunger Pengertian Implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi,

Menurut Van Meter & Van Horn implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Pada hakikatnya implementasi merupakan sebuah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah diputuskannya sebuah kebijakan. Di tahapan ini akan melibatkan seluruh stake holder yang ada. Implementasi kebijakan meliputi 3 unsur yaitu; (1) Tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administrative; (2) Tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring social; dan (3) Juga ekonomi yang memengaruhi tindakan para stake holder.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono (1994:149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa factor penghambat, yaitu :

- 1) Isi Kebijakan dimana: (a) Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada; (b) Karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan; dan (c) Kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya atau dana dan sumber daya manusia.
- 2) Informasi Implementasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- 3) Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Pembagian Potensi. Gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan

pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

C. Pengelolaan Persampahan

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kata Pengelolaan mempunyai 4 pengertian, yaitu; (a) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; (b) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; (c) Pengelolaan adalah proses yang membantu mermuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; dan (d) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

2. Pengertian Persampahan

Menurut definisi *World Health Organization (WHO)* sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006 : 45). Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Juli Soemirat (1994 : 34) berpendapat bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat.

3. Pengelolaan sampah

Sementara itu metode pembuangan dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Penimbunan darat Pembuangan sampah pada penimbunan darat termasuk menguburnya untuk membuang sampah, metode ini adalah metode paling populer di dunia.
- b) Daur ulang Proses pemilahan sampah yang masih memiliki nilai secara materiil untuk digunakan kembali disebut sebagai daur ulang (*reuse*). Ada beberapa cara daur ulang, pertama adalah mengambil bahan sampahnya untuk diproses lagi atau mengambil energi dari bahan yang bisa dibakar untuk membangkitkan listrik.
- c) Pengolahan kembali secara fisik Metode ini adalah aktivitas paling populer dari daur ulang, yaitu mengumpulkan dan menggunakan kembali sampah yang dibuang, contohnya botol bekas pakai yang dikumpulkan untuk digunakan kembali.
- d) Pengolahan Biologis Material sampah organik, seperti residu tanaman, sampah makanan, atau kertas, bisa diolah dengan menggunakan proses biologis menjadi kompos, atau dikenal dengan istilah pengkomposan.

- e) Pemulihan Energi. Kandungan energi yang terkandung dalam sampah bisa diambil langsung dengan cara menjadikannya bahan bakar, atau secara tidak langsung dengan cara mengolahnya menjadi bahan bakar tipe lain.

D. Peran Serta Masyarakat dalam implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

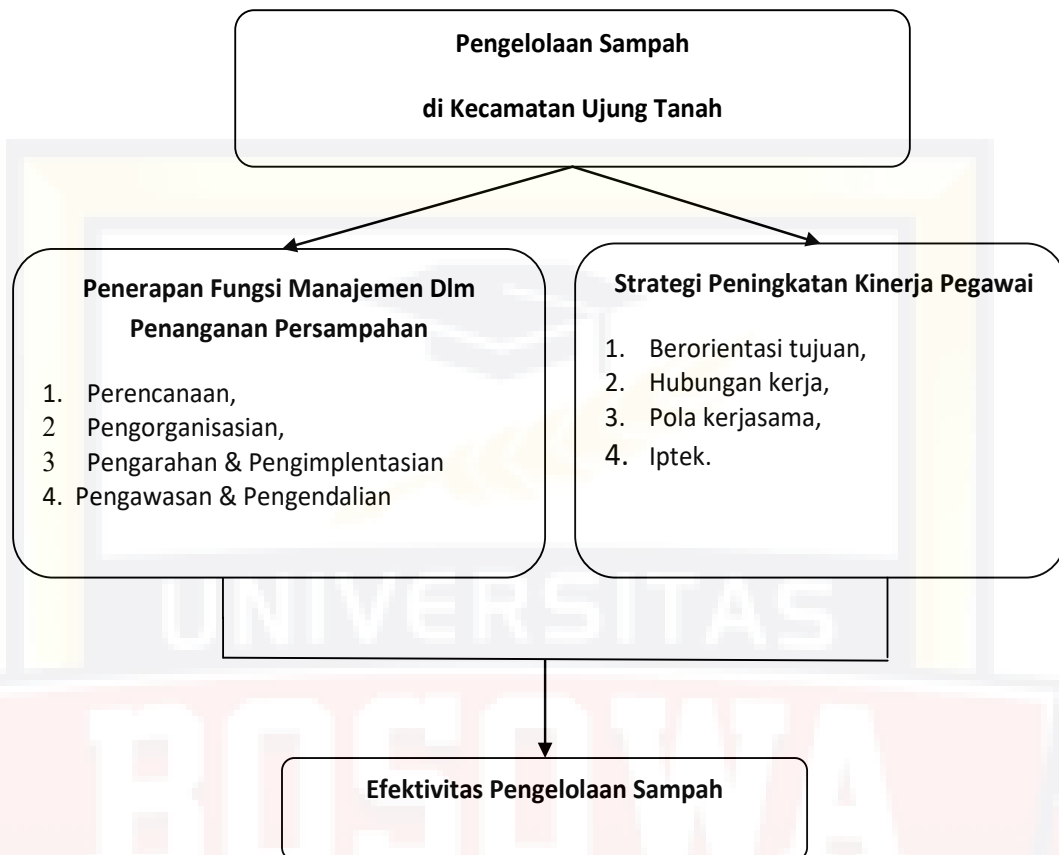
Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar dalam hal pembayaran retribusi cukup bagus. Akan tetapi peran serta dalam hal keterlibatan dalam teknis operasional pengelolaan sampah masih sangat kurang. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan warga dalam menaati jadwal/jam pembuangan sampah. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 Perda Kota Makassar nomor 4 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, nyatanya masih sangat sedikit masyarakat yang mau melaksanakan pemilahan sampah di tingkat sumber (rumah tangga). Hal tersebut menyebabkan volume sampah yang harus dikelola Pemerintah sangat besar, yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar pula.

Hambatan dalam pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hambatan dari dalam (internal) dan hambatan dari luar (eksternal). Hambatan dari dalam masyarakat adalah apakah masyarakat memang ingin terlibat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu juga dari kondisi dan karakteristik masyarakat itu sendiri, misalnya tingkat perekonomian, tingkat pendidikan dan unsur kepercayaan. Hambatan dari luar masyarakat terutama muncul karena belum adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Hambatan utama dalam partisipasi adalah kemampuan membayar masyarakat, pola kehidupan masyarakat dan birokrasi pengaduan pelayanan. Masyarakat dengan kondisi kemampuan keuangan yang terbatas, relatif kecil harapan agar mereka dapat berpartisipasi. Heterogenitas masyarakat dalam ras, etnik, agama maupun politik mempengaruhi sikap mereka untuk ikut berpartisipasi ataukah tidak. Birokrasi yang panjang dan rumit menjadi penghambat masyarakat untuk berpartisipasi.

Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif dan efisien serta bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat maka Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2020. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dias Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan (*Library Research*), dan penelusuran data online. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat dimana data diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Sementara itu kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi data, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan *member check*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

1) Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah

Di Kecamatan Ujung Tanah sendiri sudah menerapkan fungsi manajemen pengelolaan persampahan dengan baik, dapat dilihat dari pola perencanaan yang dimiliki, pengorganisasian yang baik dan teratur, pengimplementasian kerja yang terukur dan terarah serta pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dapat dikontrol dan dievaluasi setiap saat.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap hari dalam manajemen pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Tanah adalah :

1. Pengemasan dan Pemilihan Sampah dari Rumah Tangga

Berdasarkan wawancara dengan informan penelitian, untuk mempermudah petugas mengangkut sampah rumah tangga sangat diharapkan bagi pemilik rumah untuk senantiasa sudah melakukan pengemasan sampahnya kedalam kantong / karung sampah atau tempat sampah lainnya yang tersedia, juga sebisa mungkin melakukan pemilihan sampah yang dapat bernilai ekonomis seperti sampah berbahan plastik seperti botol-botol plastik, sampah berbahan dari karton / kertas maupun yang dari besi maupun aluminium seperti kaleng-kaleng dari seng / aluminium, yang kemudian masyarakat dapat mengantarkannya ke Bank-Bank Sampah yang sudah ada ataupun dapat membuat keterampilan kerajinan tangan berbahan dari sampah yang dikenal dengan nama keterampilan daur ulang sampah ini semua tentunya diharapkan dapat mengurangi volume sampah sebelum sampai ke Tempat pembuangan akhir (TPA)

Seperti yang disampaikan Informan 1 (inisial AH) yang menyatakan :

"Sangat diharapkan masyarakat sudah melakukan pengemasan sampahnya sejak dari titik rumah tangga sehingga ini dapat memudahkan petugas kami melakukan penjemputan sampah, dan masyarakat yang peduli juga sudah melakukan pemilahan sampah bernilai ekonomis untuk mereka bawa ke Bank Sampah Unit yang ada di wilayah kelurahan masing-masing" (Wawancara dengan Kasi Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Ujung Tanah, tanggal 06 Juli 2020)

Selanjutnya pernyataan Informan di benarkan dan dikuatkan oleh responden setelah dilakukan wawancara

"Iya pak, Sampah kami sudah utuh dikemas dalam kantong besar kadang juga pakai karung, untuk sampah basah kami buang langsung karna belum tahu mengolahnya hanya sampah-sampah plastic, botol-botol, kaleng-kaleng, gelas-gelas plastik, Dos atau karton kami pisahkan lalu kami bawa timbang ke Bank Sampah terdekat ataupun terkadang pengelola bank sampahnya yang datang menjemputnya jika sudah terkumpul banyak" (Wawancara dengan salah satu Ibu rumah tangga yang bersedia menjadi responden, tanggal 08 Juli 2020)

Disini ditemukan masih banyak warga masyarakat yang belum melakukan pengemasan dan pemilahan sampah secara terpadu sehingga sampah yang tadinya masih dapat di Daur ulang harus terbuang dan menambah volume sampah sampai ke TPA, masih dibutuhkan sosialisasi pengelolaan sampah dimasyarakat sehingga sampah tidak lagi menjadi musuh tetapi dapat menghasilkan tambahan pundi-pundi penghasilan yang bernilai ekonomis.

2. Pengangkutan sampah rumah tangga

Penjemputan dan pengangkutan sampah rumah tangga dilakukan oleh armada Motor Fukuda Sampah bagi rumah tangga yang berada di dalam lorong-lorong / gang dan Mobil Tangkasaki yang berada di Jalan poros atau jalan penghubung yang dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Sampah rumah tangga yang sudah dikemas dengan baik oleh pemiliknya dan disimpan diluar rumah dimalam hari, sehingga para petugas motor sampah fukuda yang beraktivitas dari jam 05.30 Pagi hari dapat dengan mudah mengangkut sampah tersebut ke bak motor fukuda yang dapat memuat sampah sekitar $\pm 1 M^3$.

Dengan jumlah armada motor sampah jenis fukuda sebanyak 54 unit yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah dianggap sudah cukup memadai untuk dapat melakukan pengangkutan sampah di dalam Lorong-Lorong / Gang yang cukup banyak di wilayah ini karna keberadaannya di wilayah pemukiman padat penduduk.

Sementara untuk ruas-ruas jalan protokol pengangkutan sampah dilakukan oleh mobil-mobil jenis tangkasaki dan mobil duntruck yang masing-masing sudah dilengkapi sopir dan 2 orang awak, dengan jumlah armada jenis Mobil umbrroll sebanyak 3 Unit, Mobil duntruck sebanyak 5 Unit dan Mobil Tangkasaki sebanyak 9 Unit, Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah dianggap sudah cukup memadai dimana armada ini beroperasi untuk seluruh wilayah yang ada di Kecamatan Ujung Tanah.

Bilamana diantara armada ini terdapat kerusakan-kerusakan juga sudah tersedia bengkel milik Dinas Pekerjaan Umum yang akan melakukan perbaikan-perbaikan dan peremajaan dari kendaraan-kendaraan tersebut. Berikut adalah hasil petikan wawancara mendalam terhadap Informan menjelaskan bahwa :

"Butuh sinergitas antara Kecamatan dan Kelurahan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama persoalan pengelolaan persampahan, salah satu yang mesti koordinasikan yaitu penjemputan dan pembuangan sampah karna terkesan kita di Kecamatan Ujung Tanah agak lambat jadwal penjemputannya karna pembuangan sampahnya warga terlambat keluar, kita pernah coba lebih awal ternyata tidak maksimal sehingga jadwal beroperasinya itu fukuda yah nanti jam 07 pagi, padahal sebenarnya aturannya yaitu jam 06 pagi itu sudah harus selesai atau steril sebelum masyarakat beraktivitas begitupun di sore hari sudah bisa selesai pukul 17.00 baik

penyapu, fukuda maupun bongkar muat” (Wawancara dengan Kasi Kebersihan dan Pertamanan Kecamatan Ujung Tanah, tanggal 06 Juli 2020)

Adapun Kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah yang memiliki volume sampah paling banyak sesuai jumlah penduduk dan luas wilayah yaitu Kelurahan Cambaya dan Kelurahan Patingalloang. Dalam hal ini kami temukan pula kendala dimana menurut petugas kebersihan yang kami wawancara juga menyebutkan operasional yang mereka terima terkadang terlambat dibayarkan, kendala lain adalah terkadang sampah warga tidak terkemas baik dan berhamburan serta menemukan sampah luar biasa yang terkadang sulit di eksekusi oleh petugas motor sampah jenis fukuda.

3. Penyapu Jalan yang membersihkan ruas-ruas jalan protokol dan jalan penghubung.

Sesuai rute kerja masing-masing mulai dari Pukul 05.30 Dini hari dengan pakaian seragam lengkap yang dibagikan dan perlengkapan kerja seperti sapu dan tempat sampah yang sudah ada, dapat memulai bekerja lebih pagi karna diharapkan sudah selesai aktivitasnya ketika masyarakat sudah beraktivitas mulai akan ketempat kerja dan kekantor masing-masing di Pagi hari. Dengan jumlah penyapu jalan yang ada saat ini sebanyak 37 orang diharapkan ini sudah cukup mengcaver semua ruas-ruas jalan protokol dan jalan penghubung yang ada di Kecamatan Ujung Tanah, Jalan yang bersih dapat menjadi pemandangan di Pagi hari ketika warga kota mulai beraktivitas.

“Mereka sudah bekerja pak, Dini hari sampah masyarakat kota dari aktivitas dimalam hari diharapkan sudah bersih sebelum aktivitas warga kembali di Pagi hari, dibawah pengawasan mereka harus membersihkan seluruh ruas-ruas jalan yang menjadi rute pekerjaan yang sudah ditentukan masing-masing oleh pengawas kebersihan yang sudah ditunjuk sesekali mereka pun harus ikut melaksanakan kerja bakti bersama bilamana dibutuhkan oleh pihak Kelurahan maupun Kecamatan” (Wawancara dengan Pengawas Kebersihan Kecamatan Ujung Tanah, tanggal 10 Juli 2020)

4. Aktivitas pemindahan sampah (Bongkar Muat)

Dari motor sampah fukuda lalu dipindahkan sampahnya ke Mobil sampah jenis umbroll dan Mobil sampah jenis duntruck untuk segera diangkut menuju tempat pembuangan akhir sampah TPA yang ada di Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Pekerjaan ini biasanya dikerjakan bersama-sama oleh awak mobil, sopir fukuda dan sopir mobil yang bersangkutan, dalam kegiatan ini menjadi kesempatan pula para petugas kebersihan melakukan pemilahan sampah yang ditemukan yang bernilai ekonomis untuk dijadikan penambah pundi-pundi penghasilan sebelum akhirnya sampah itu terbuang habis di tempat pembuangan akhir.

Kendala TPA yang sudah sangat padat dan sampai saat ini belum ada penambahan lahan baru membuat sopir mobil sampah terkadang kesulitan mengakses masuk TPA Antang dan terkadang pula masyarakat sekitar menutup akses ke TPA sehingga ini semua dapat

menjadi factor penghambat pengelolaan sampah sehingga terkadang terjadi penumpukan sampah karena tidak terangkut sampai ke TPA satu-satunya yang dimiliki Pemkot Makassar yakni yang terdapat di Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar.

5. Penyiram Tanaman yang memelihara Taman-Taman kota di ruas Jalan.

Kendaraan roda tiga berjenis Triseda yang sudah dimodifikasi dengan bak air besar dibagian belakang menjadi kendaraan tekhnis yang digunakan untuk melakukan penyiraman dan pemeliharaan tanaman di taman-taman kota yang ada di ruas-ruas jalan protokol dan jalan penghubung, setiap pagi dan sore hari ditugasi untuk melakukan penyiraman tanaman-tanaman di jalan dan taman kota yang terdapat di ruas-ruas jalan protokol juga terhadap pot-pot bunga berukuran besar yang juga terdapat di ruas jalan.

Sebelum beraktivitas terlebih dahulu kendaraan diisi penuh baknya dengan air bersih yang bertonase kurang lebih 800 liter dengan berkeliling wilayah poros kecamatan dan kelurahan menyirami pot-pot dan tanaman-tanaman yang ada di ruas-ruas jalan yang memiliki taman-taman Kota.

6. Pemotong Rumput

Aktivitas lainnya yang dapat dilihat dari pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah adalah aktivitas pemotong rumput yang bertugas membersihkan daerah-daerah milik jalan dan tempat-tempat lainnya yang sudah ditumbuhi rumput liar dan merusak estetika dan keindahan kota. Dengan menggunakan alat jenis pemotong rumput yang berbahan bakar bensin, seorang petugas dapat membawa perlengkapan tersebut sambil melakukan pembersihan pemotongan rumput liar yang kadang mengganggu karna menutupi sebahagian badan jalan.

7. Pembinaan Bank Sampah Sektoral Kecamatan Ujung Tanah dan Bank-Bank Sampah Unit di Kelurahan

Bank Sampah Sektoral Kecamatan Ujung Tanah saat ini tidak berjalan maksimal karna kesulitan kekurangan personel pengelolanya hampir sudah tidak ada lagi kegiatan, sehingga saat ini diharapkan Bank Sampah Unit yang ada di masing-masing Kelurahan yang masih aktif mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan keberadaan Bank Sampah.

Adapun informasi yang kami dapatkan masih terdapat Bank Sampah yang masih bertahan dan aktif sampai saat ini yakni: (a) Bank Sampah 'Mata Allo' Kelurahan Totaka; (b) Bank Sampah 'Hoki' Kelurahan Tamalabba; (c) Bank Sampah 'Sikatutui' Kelurahan Pattingalloang baru; (d) Bank Sampah 'Maju Bersama' Kelurahan Tabaringan; (e) Bank Sampah 'Madeceng' Kelurahan Tabaringan; (f) Bank Sampah 'Tawakkal' Kelurahan Camba Berua; (g) Bank Sampah 'Mawar Pati' Kelurahan Pattingalloang; dan (h) Bank Sampah 'Pattingalloang 4'.

2) Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Kebersihan yang terkait dengan Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Ujung Tanah

2.1. Berorientasi Tujuan

Kepedulian dan orientasi tujuan yang sama pada hasil akhirnya menjadi strategi peningkatan kinerja pegawai kebersihan di Kecamatan Ujung Tanah. Pendekatan penilaian yang berorientasi tujuan ini secara teknologis telah merangsang berkembangnya proses-proses perumusan tujuan secara spesifik serta pengembangan atau penemuan instrument-instrumen maupun prosedur pengukuran yang beragam.

Dari hasil wawancara dengan subjek penelitian bahwa kepedulian dan penciptaan lingkungan kerja yang bersahabat dengan satu tujuan yang diharapkan menjadi motivasi peningkatan kinerja para petugas kebersihan di Kecamatan Ujung Tanah. Berikut petikan wawancara dengan subjek penelitian :

Informan 2 (inisial AH) menjelaskan bahwa :

"Selain gaji / gaji yang cukup, juga operasional yang cukup ditujukan untuk menopang hidup para anggota kebersihan kami, kita juga kadang melakukan anjingsana ketempat kerjanya memberi motivasi dan juga setiap waktu melakukan evaluasi melalui rapat rutin tiap bulan untuk mendengarkan keluhan serta kendala yang dihadapinya" (Wawancara dengan Kasi Pengelolaan Kebersihan Kecamatan Ujung Tanah, tanggal 07 Juli 2020)

Demikian juga yang disampaikan oleh informan 3 (inisial AS) yang menjabat sebagai Lurah Tabaringan Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar

"Tentunya kita selalu memperjuangkan nasibnya, kelayakan penghasilannya dan perbaikan derajat kesehatannya semua kita perhatikan disamping pendekatan kekeluargaan dan sesekali memberi motivasi dan wejangan untuk kebaikan dan kehidupannya sehingga ini semua diharapkan dapat memacu dan memicu peningkatan kinerja mereka" (Wawancara dengan Lurah Tabaringan, tanggal 08 Juli 2020)

Untuk peningkatan kinerja pegawai kebersihan Kecamatan Ujung Tanah dilakukan orientasi berbasis tujuan yang sama yang ingin diciptakan oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah yang tertuang pada Visi Misi Kecamatan dengan satu harapan dan tujuan bersama menciptakan tata kelola kebersihan yang handal dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga mempermudah pencapaian penilaian Adipura dan mewujudkan makassar sebagai Kota yang bersih dan nyaman untuk semua.

2.2. Hubungan Kerja

Hubungan Kerja merupakan hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu- individu baik antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Setiap organisasi mempunyai tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut orang atau bagian-bagian yang tergabung dalam organisasi tersebut dan juga pihak lain yang berkaitan akan melakukan hubungan kerja. Dalam era globalisasi sekarang ini tidak satupun unit atau organisasi yang dapat mencapai tujuan tanpa hubungan kerja. Macam-macam hubungan Kerja:

- a) Hubungan kerja Vertikal (garis lurus kebawah/Tegak) Hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan.
- b) Hubungan kerja horisontal (Garis lurus kesamping) Hubungan kerja antar pimpinan pada kedudukan yang sama.
- c) Hubungan kerja diagonal (silang) Hubungan kerja antara pejabat yang berbeda lembaga/induk organisasi.
- d) Hubungan kerja Fungsional Hubungan kerja antar unit / lembaga dan pejabat yang mempunyai bidang pekerjaan yang sama (Tingkatan jabatan bisa berbeda).
- e) Hubungan kerja informative Hubungan kerja antara lembaga atau pejabat dengan tingkat atau bidang apa pun untuk saling memberikan dan memperoleh keterangan.
- f) Hubungan kerja konsultatif Hubungan kerja antar pejabat yang karena jabatan berkepentingan melakukan konsultasi antara satu dengan lainnya.
- g) Hubungan kerja direktif Hubungan kerja antara pimpinan unit organisasi atau pejabat yang disatu pihak mempunyai wewenang dan kewajiban memberikan bimbingan, pengarah an, pertimbangan, saran atau nasehat dalam bidang kerja hirarkhis / tingka tan tertentu, sedang pihak lain mempunyai kewajiban melaksanakan bimbing an, pengarah an, pertimbangan, saran dan atau nasehat tersebut.
- h) Hubungan Kerja koordinatif. Hubungan kerja antar pejabat untuk memadukan(mengintegrasikan), menyera sikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berka itan dalam gerak, langkah dan waktu untuk pencapaian tujuan dan sasaran ber sama. Hubungan organisasi meliputi 2 jenis: Hubungan formal : Hubungan kerja antar lembaga atau pejabat yang dilakukan sesuai dengan garis garis wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam tingkatan (Hirarkhis). Hubungan informal: Hubungan antara pribadi dalam organisasi atau dengan pihak lain diluar orga nisasi yang berdasarkan perikatan yang sifatnya pribadi (suka dan tidak suka). Organisasi formal merupakan organisasi yang dengan penuh kesadaran dan dengan sengaja dibentuk, dimana didalamnya terdapat suatu sistem dan hierarkhi hubungan antar wewenang, tugas dan tanggung jawab para anggota

nya demi terlaksananya kerja sama yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3. Pola Kerjasama

Pola kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, Keinginan dua pihak menjalin suatu kerja sama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain.

Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan mencapai hasil yang lebih baik daripada dilakukan secara sendiri-sendiri. Begitu juga dalam sejarah, prestasi atau keberhasilan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui kerjasama. Mengapa harus bekerjasama ?, Peter Honey (dalam petertson,2010) mengatakan ada beberapa alasan mengapa bekerjasama sangat penting baik dalam organisasi ataupun kelompok yaitu individu dapat belajar dengan cepat dari pada sebagai individu sendiri.

Hal itu sangat penting dalam hubungan yang harmonis antara pimpinan dengan pegawai yang memegang peranan yang strategis bagi organisasi, terutama dalam kegiatan operasional organisasi membutuhkan suatu kerja sama yang saling mendukung dan mempengaruhi di antara berbagai elemen yang ada dalam organisasi Kerja sama merupakan suatu bentuk perwujudan daripada hubungan dua orang atau lebih dalam usaha mencapai tujuan bersama (Wursanto 2005:45) . Hal itupun, ditegaskan oleh Ratminto dan Winarsih (2005:129), bahwa kerja sama adalah komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, ini berarti setiap anggota organisasi harus menghindari dari ego sektoral dan mementingkan bagian oraganisasinya sendiri, yang mengorbankan tujuan organisasi secara keseluruhan. Jika setiap manusia hanya mementingkan dirinya sendiri dalam organisasi tanpa memperdulikan orang lain, maka akan timbul perselisihan, pertengkaran bahkan perkelahian atau gejolak sosial. Agar tidak terjadi persoalan dalam sebuah organisasi, maka sudah sepatutnya individu atau kelompok harus mengutamakan kepentingan bersama.

Kepentingan bersama atau kerja sama merupakan bagian dari organisasi, baik organisasi pemerintah maupun swasta, dalam oragnisasi telah terdapat seorang pimpinan dan bawahan. Pimpinan dan bawahan saling membutuhkan dalam hal kerja sama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Organisasi akan berkembang apabila adanya kerja sama antara pimpinan dan bawahannya. Berdasarkan kenyataan yang ditemui di distrik supiori timur kampung yawerma telah terdapat permasalahan yang terjadi dalam organisasi pemerintahan kampung seperti kurangnya, koordinasi, komunikasi, tingginya sikap egoisme, dan kurangnya kerja sama dalam organisasi. Keempat masalah yang dikemukakan di

atas merupakan penghambat tercapainya tujuan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. (Priansa, 2014:80), koordinasi adalah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan sumber-sumber lain ke arah tercapainya maksud-maksud yang telah ditetapkan.

Sayuti (2013:76) menyatakan bahwa Komunikasi adalah kesatuan berbagai aspek yang diperlukan dalam rangka pemindahan informasi antara dua belah pihak untuk memperoleh pengertian yang sama dalam rangka menjalankan tugas-tugas organisasi perusahaan (kantor) untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut. Moekijat, (2008:76) mengatakan bahwa Egoisme adalah sikap mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan atau tidak menghargai orang lain. Sayuti (2013:57), menyatakan kerja sama adalah melakukan pekerjaan secara saling bantu membantu, maksudnya sekelompok orang melakukan pekerjaan yang berbeda namun terikat dengan tujuan yang sama, untuk mencapai tujuan itu maka semua orang yang terikat dengan tujuan itu harus menjalin komunikasi satu dengan yang lain agar dapat memastikan dan saling tukar informasi tentang perkembangan atau pencapaian pekerjaan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota organisasi. Untuk mencapai hasil yang baik, maka dibutuhkan adanya kerja sama yang dilakukan melalui koordinasi dan saling menghargai atau menghilangkan sikap egoisme.

Bawahan harus bekerja sama dengan atasan, menghargai atasan, dan selalu berkoordinasi agar proses kerja samanya dapat implementasikan dengan baik. Selanjutnya, atasan juga harus mampu memberi koordinasi yang baik terhadap bawahan, menghargai kinerja dan pendapat yang diusulkan oleh bawahan. Apabila telah terjalin koordinasi dan sikap saling menghargai dalam sebuah organisasi, maka akan tercipta kerja sama yang baik dalam mencapai tujuan kerja yang ditargetkan. Agar tujuan yang hendak di capai mudah terwujud, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bekerja sama. Perlu di pahami Bagaimana orang orang melakukan kerja sama itu? Untuk terwujudnya kerja sama dapat ditempuh melalui 4 (empat) aspek cara: (a) Berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya; (b) Harus ada koordinasi (kontak keselarasan); (c) Harus mempunyai wewenang tertentu; dan (d) Pengarah (pemimpin)

2.4. Iptek

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang lebih dikenal dengan akronim IPTEK merupakan suatu sumber dimana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Pengembangan ilmu teknologi dan teknologi sendiri dibuat dengan tujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia.

Kita ketahui bahwa sebenarnya sejak dulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia berakal. Dengan akal nya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akal nya dan akal nya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya.

Pada satu sisi, perkembangan dunia IPTEK yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis, Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktifitas manusia. Ringkas kata kemajuan IPTEK yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Sumbangan IPTEK terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa IPTEK mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia.

Nana Syaodih S. (1997: 67) menyatakan bahwa sebenarnya sejak dahulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dulu memecahkan kemiri dengan batu atau memetik buah dengan galah, sesungguhnya mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana.

Terkait dengan teknologi, Anglin mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan menyistem untuk memecahkan masalah. Ahli lain, Kast & Rosenweig menyatakan Technology is the art of utilizing scientific knowledge. Sedangkan Iskandar Alisyahbana (1980:1) merumuskan lebih jelas dan lengkap tentang definisi teknologi yaitu cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia.

Dari beberapa pengertian di atas nampak bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya teknologi. Artinya, bahwa teknologi merupakan keseluruhan cara yang secara rasional mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia.

Seseorang menggunakan teknologi, karena manusia berakal. Dengan akal nya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih mudah, lebih aman, dan lebih-lebih yang lain. Perkembangan teknologi terjadi bila seseorang menggunakan alat dan akal nya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh dapat dikemukakan pendapat pakar teknologi "dunia" terhadap pengembangan teknologi.

Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Sistem kerja robotis telah mengalihfungsikan tenaga otot manusia dengan pembesaran dan percepatan yang menakjubkan. Begitupun dengan telah ditemukannya formulasi-formulasi baru aneka kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Namun, pada sisi lain, pesatnya kemajuan iptek ternyata juga cukup banyak membawa pengaruh negatif. Semakin kuatnya gejala "dehumanisasi", tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan dewasa ini, merupakan salah satu oleh-oleh yang dibawa kemajuan iptek tersebut. Bahkan, sampai tataran tertentu, dampak negatif dari peradaban yang tinggi itu dapat melahirkan kecenderungan pengingkaran manusia sebagai homo-religiosus atau makhluk teomorfis.

Bagi masyarakat sekarang, iptek sudah merupakan suatu religion. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan dan immortalitas.

Sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Dalam peradaban modern yang muda, terlalu sering manusia terhenyak oleh disilusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktifitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia.

Oleh karena itu untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi.

Pembahasan

Membahas masalah sampah setiap individu pasti menghasilkan sampah, realitas ini tidak dapat dipungkiri lagi. Karena itu, selama masih ada kehidupan di atas dunia ini, maka sampah akan selalu ada. Lantaran individu adalah produsen sampah, yang patut dipikirkan adalah bagaimana manajemen pengelolaan sampah itu. Baik dalam konteks individu yang dituntut untuk membuang sampah pada tempatnya ataupun dalam konteks pemerintah kota sebagai manajerial yang mengelola sampah yang dihasilkan warganya.

Di Kota Makassar sendiri, beberapa upaya telah dan tengah ditempuh pemerintah kota Makassar, mulai dari penambahan sarana dan prasarana seperti yang sering kita lihat mobil TANGKASAKI (Truk Angkutan Sampah Kita) dan motor fukuda hingga penambahan penyiapan sumberdaya manusia untuk memungut sampah itulah salah satu bentuk keseriusan pemerintah kota Makassar dalam mengatasi persoalan sampah yang tidak ada habisnya.

Dengan adanya Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah, maka regulasi ini sebagai dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan penataan kota makassar yang bersih dan jauh dari sampah. ditambah lagi masyarakat berkewajiban untuk mematuhi dan menjalankan aturan ini sebagai pedoman dalam mewujudkan makassar tidak rantasa.

Pengelolaanpersampahan yang dilakukan di setiap Kecamatan khususnya Kecamatan Ujung Tanah yang dijadikan peneliti sebagai tempat melakukan penelitian dan berharap semoga manajemen pengelolaan persampahan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sehingga pelayanan persampahan lebih baik lagi dan peran serta masyarakat dalam menyadari akan pentingnya hidup secara teratur dan bersih dan yang lebih penting semoga lebih banyak lagi masyarakat yang sadar akan pentingnya budaya hidup bersih.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka dapat dikatakan bahwa manajemen pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar dinilai sudah efektif ditinjau dari sub variabel perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

a. Sub Variabel Perencanaan (*Planning*)

Pada penelitian ini beberapa indikator yang dibahas terkait dengan sub variabel perencanaan (*planning*) antara lain ketersediaan data volume sampah rumah tangga dan industri, sarana dan prasarana kebersihan dan data petugas / satuan tugas pengelola persampahan di Kecamatan Ujung Tanah.

Menurut Terry (2003:9) memaparkan bahwa "perencanaan (*planning*) adalah menemukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu".

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Terry menjelaskan bahwa perencanaan sangat penting dan perlu untuk setiap usaha mencapai tujuan. Alasan ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa kondisi masa depan tidaklah pasti. Lingkungan yang berubah begitu cepat menuntut siapa pun baik perseorangan maupun lembaga untuk selalu membuat rencana. Tanpa membuat perencanaan, organisasi akan kehilangan arah dan sulit untuk mengantisipasi ancaman perubahan lingkungan.

Pada penelitian ini beberapa indikator yang dibahas terkait dengan aspek perencanaan antara lain Ketersediaan data volume sampah / produksi sampah rumah tangga ataupun kantor dan industri dan data sarana prasarana pendukung yang dimiliki serta data kesiapan personil / anggota petugas kebersihan dengan peta wilayah kerja masing-masing. Adapun penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Ketersediaan data jumlah volume / produksi sampah masyarakat

Berdasarkan paparan hasil analisis data berdasarkan akumulasi wawancara terhadap informan terkait indikator ketersediaan data jumlah volume / produksi sampah masyarakat. Ini dilihat dari hasil wawancara kami dengan informan dibagian pengelolaan kebersihan Kecamatan Ujung Tanah.

Hasil wawancara dengan informan di Kantor Camat Ujung Tanah menyatakan tersedia data bulanan rekapitulasi volume sampah mobil dumbtruk di Kecamatan Ujung Tanah yang didapat dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah. Hal ini didukung hasil observasi yang peneliti lakukan dengan mendengarkan langsung informan salah satu petugas sampah yang dapat memahami mengukur jumlah volume sampah yang mereka angkut setiap harinya ke tempat pembuangan akhir sampah TPA di Antang Makassar.

2) Ketersediaan data jumlah personel / satgas kebersihan yang dimiliki

Jumlah personel atau satgas kebersihan yang dimiliki Kecamatan Ujung Tanah berdasarkan data dianggap sudah cukup memadai kecuali personel dalam hal pengawasan kerja petugas kebersihan yang dianggap belum cukup mencakup pengawasan disetiap kelurahan.

Ada 142 Orang yang bertugas di bidang kebersihan antara lain penyapu jalan sebanyak 37 Orang, sopir fukuda 47 orang dan selebihnya bertugas sebagai sopir mobil truk, mobil umbroll, mobil tangkasaki beserta awak, penyiram taman, pemotong rumput serta

pengawas dan staf yang semua terdaftar dalam satuan tugas persampahan tingkat Kecamatan Ujung Tanah.

3) Ketersediaan data jumlah sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki.

Sarana dan Prasarana pendukung yang dimiliki dalam rangka percepatan pelaksanaan kerja-kerja dilapangan sangat dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas kerja, untuk itu dibutuhkan data yang lengkap terkait kesiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jumlah sarana dan armada yang dimiliki antara lain Mobil tangkasaki sebanyak 9 Unit, Truk sebanyak 5 Unit, Arm Roll sebanyak 3 Unit, Motor Sampah sebanyak 54 Unit, Fukuda penyiram sebanyak 2 Unit, dan lain-lain.

b. Sub Variabel Pengorganisasian (*Organizing*)

Pada penelitian ini beberapa indikator yang dibahas terkait dengan sub variabel pengorganisasian (*organizing*) antara lain ketersediaan struktur organisasi pengelolaan persampahan, dan pembagian tugas pengelolaan persampahan. Menurut Terry (2006:17) organizing mencakup: (a) membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Terry menjelaskan bahwa apabila seorang atasan tidak mau mendelegasikan wewenang, maka sesungguhnya organisasi itu tidak butuh siapa-siapa selain dia sendiri. Bila atasan menghadapi banyak pekerjaan yang tak dapat dilaksanakan oleh satu orang, maka ia perlu melakukan delegasi. Pendelegasian juga dilakukan agar manajer dapat mengembangkan bawahan sehingga lebih memperkuat organisasi, terutama di saat terjadi perubahan susunan manajemen.

Pada penelitian ini beberapa indikator yang dibahas terkait dengan aspek pengorganisasian antara lain Ketersediaan struktur organisasi pengelolaan persampahan dan pembagian tugas pengelolaan persampahan. Adapun penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Ketersediaan struktur organisasi pengelolaan persampahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, salah satu seksi di Pemerintahan Kecamatan Ujung Tanah yakni Seksi Pertamanan dan Pengelolaan Kebersihan yang kemudian melakukan rekrutmen pengawas kebersihan dan pekerja lepas selaku satuan tugas / satgas penanganan pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.

2) Pembagian tugas pengelolaan persampahan

Dikantor Camat Ujung Tanah pembagian tugas pengelolaan persampahan didapatkan dari rekrutmen petugas kebersihan mulai dari pengawas kebersihan dan satuan tugas / satgas kebersihan hasil rekrutmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah untuk selanjutnya dibuatkan SK penugasannya.

Bila dihubungkan dengan teori Terry (2006:17), pengorganisasian yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 sudah jelas adanya struktur organisasi juga untuk mengatur siapa yang melaksanakan tugas atau pekerjaan serta membagi dan mengatur tugas dan pekerjaan yang diemban dalam suatu organisasi dengan adanya fokus indikator kajian pengorganisasian yang terdiri dari ketersediaan struktur organisasi pengelolaan persampahan dan pembagian tugas pengelolaan persampahan.

Sebagai kesimpulan pembahasan untuk fokus kajian pengorganisasian dari kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian (*Organizing*) dalam pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah sudah berjalan Efektif. Hal ini dinilai dari akumulasi hasil wawancara yang dilakukan peneliti.

c. Sub Variabel Pelaksanaan (*Actuating*)

Pada penelitian ini beberapa indikator yang dibahas terkait dengan sub variabel pelaksanaan (*actuating*) adalah pelaksanaan pengelolaan persampahan yang selama ini telah dilaksanakan dan dijalankan oleh satuan tugas / satgas kebersihan Kecamatan Ujung Tanah.

Pengertian pelaksanaan (*actuating*) sebagaimana dikemukakan Terry (2003:9) adalah usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Terry memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Hasil wawancara dan observasi dengan informan di Kantor Camat Ujung Tanah menyimpulkan bahwa pengelolaan persampahan di Kantor Camat Ujung Tanah sudah efektif karena dalam penanganan pengelolaan persampahan sudah berjalan sebagaimana mestinya mulai dari Pengemasan dan pemilahan sampah dari rumah tangga, pengangkutan sampah rumah tangga, Aktivitas penyapu jalan, Aktivitas pemindahan sampah, Aktivitas penyiram tanaman, Pemetong rumput dan pembinaan pengelolaan Bank Sampah yang ada.

d. Sub Variabel Pengawasan (*Controlling*)

Pengertian pengawasan (*controlling*) sebagaimana dikemukakan Terry (2003:9) yaitu pengawasan adalah salah satu fungsi-fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-sebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Terry menjelaskan konsep pengawasan sebenarnya menunjukkan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak di bawahnya dan untuk memastikan apakah kegiatan sesuai yang direncanakan sebelumnya.

Pada penelitian ini beberapa indikator yang dibahas terkait dengan aspek pengorganisasian antara lain pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Adapun penjelasan masing-masing indikator sebagai berikut:

1) Pengawasan intern

Pengawasan intern dilakukan langsung oleh 3 orang pengawas langsung yang direkrut oleh Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah, Pelaksanaan pengawasan juga melibatkan Kasi Pengelolaan Kebersihan Kecamatan maupun Kelurahan dan di evaluasi langsung oleh Camat Ujung Tanah selaku pimpinan.

2) Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern dimana masyarakat mengambil peran langsung dalam melakukan evaluasi dan pengawasan dilapangan, dimana ketika masyarakat menemukan tumpukan ataupun sampah yang tidak terangkut maka bersama aparat setempat yakni Ketua RT dan Ketua RW melaporkan langsung ditingkat Kelurahan dan Kecamatan, sehingga pengawasan eksternal ini sebagai bagian masyarakat melakukan pelaporan langsung pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Ujung Tanah.

Bila dihubungkan dengan teori Terry (2003:9), pengawasan yaitu untuk mengukur sejauhmana fungsi manajemen dalam hal pengelolaan persampahan sudah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan agar pengelolaan persampahan yang dilakukan di Kecamatan Ujung Tanah sesuai dengan mekanisme/prosedur dan aturan yang berlaku dalam hal persampahan.

Sebagai kesimpulan untuk fokus kajian pengawasan (*Controlling*) yang telah dipaparkan, dari dua indikator yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Camat Ujung Tanah dilihat dari hasil wawancara dinilai efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini secara umum sudah dapat menjawab dari tujuan penelitian, kerangka teori maupun kerangka konsep, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ditinjau dari aspek perencanaan (*planning*) sudah optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut antara lain ketersediaan data volume sampah masyarakat, data sarana dan prasarana / armada yang dimiliki, dan data petugas / satgas kebersihan (sumber daya) yang dimiliki, sehingga apa yang akan direncanakan sudah siap kemudian untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan / program teknis terkait pengelolaan persampahan di Kecamatan Ujung Tanah. Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ditinjau dari aspek pengorganisasian (*organizing*) belum optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut yaitu ketersediaan struktur organisasi pengelolaan persampahan, dan pembagian tugas pengelolaan persampahan memang sudah ada, namun saat ini di Kecamatan Ujung Tanah secara teknis masih membutuhkan sumber daya manusia dari unsur pengawas langsung dilapangan dan staf, mengingat 3 orang pengawas dilapangan dianggap tidak cukup mencaver 9 Kelurahan yang semestinya juga memiliki pengawas berjumlah 9 orang dimasing-masing Kelurahan, begitupun ketiadaan stap pelaksana dibagian pengelolaan kebersihan kecamatan membuat kadang kepala seksi dan pengawas kesulitan dalam hal pelaksanaan pengadministrasian umum.
2. Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ditinjau dari aspek pelaksanaan (*actuating*) sudah optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut yaitu berjalannya pengelolaan sampah dengan baik proses mulai dari pemilahan sampah rumah tangga lalu penjemputan sampah masyarakat baik diruas-ruas jalan maupun dilorong-lorong / gang, kemudian proses bongkar muat sampah di terminal sampah kecamatan yang dimiliki berjalan dengan baik, sampai kemudian sampah tersebut diangkut sampai ke TPA (tempat pembuangan akhir), Pengelolaan Persampahan Di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ditinjau dari aspek pengawasan (*controlling*) sudah optimal. Indikator yang digunakan untuk menilai aspek tersebut yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern sudah berjalan, pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah dimasyarakat secara intern dilakukan oleh pengawas kebersihan kecamatan bersama unsur pimpinan kecamatan

dan Pemerintah Kelurahan setempat pun turut andil dalam melaksanakan pengawasan intern, sedangkan pengawasan secara ekstern kadang pengaduan langsung dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bilamana mereka menemukan sampah yang tidak terangkut baik dirumah tangga maupun yang terkadang mereka temukan diruas-ruas jalan.

Saran-Saran

Dalam rangka pengelolaan persampahan yang lebih baik di masa yang akan datang, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Warga lebih cermat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, agar sampah yang tadinya bernilai ekonomis bisa bermanfaat bagi mereka dan mengurangi tingkat volume sampah yang sampai ke tempat pembuangan akhir yang sudah mulai tidak dapat lagi menampung sampah warga kota Makassar .
2. Untuk optimalisasi penjemputan dan bongkar muat sampah diharapkan kepada masyarakat untuk taat pada jadwal pembuangan sampah yang sudah ditetapkan agar proses aktivitas dilapangan dapat berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
3. Pemerintah Kota Makassar agar memperhatikan penambahan jumlah personel baik pengawas lapangan di kelurahan masing-masing maupun staf/pelaksana pengadministrasian umum dibagian pengelolaan kebersihan dan pertamanan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar.
4. Dengan jumlah armada dan petugas yang banyak serta perlengkapan dan peralatan kerja yang banyak pula, dibutuhkan ruangan kerja tersendiri yang cukup luas dan memadai serta mempunyai gudang peralatan kerja yang cukup dan terpisah dari pelayanan umum yang dimiliki kecamatan, saat ini di Kecamatan Ujung Tanah ruangan yang ada dianggap belum representative dari apa yang diharapkan.
5. Pemerintah harus selalu memperhatikan kesejahteraan petugas kebersihan dilapangan selaku ujung tombak pelayanan masalah persampahan dilapangan kondisi dimana dana operasional yang sering terlambat dan uang makan harian yang dianggap belum cukup merupakan keluhan tersendiri yang dirasakan oleh mereka saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Emerson, H. yang dikutip oleh Handayaniingrat, (2005), *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta, Haji Masagung.
- Islamy, Irfan, (2003), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta, Bina Aksara.

KBBI, (2005), *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Luar Jaringan (offline)*, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.

Nasution, (2003), *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.

Poerwadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Sugiyono, (2004), *Metode Penelitian*, Bandung, Alfabeta.

Thoha, Miftah, (2008), *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Dokumen - Dokumen

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.

SUMBER INTERNET

Lawo, Arief. (2015), "*Apa Itu Manajemen Publik..?*". *Jurusan Administrasi Negara/Manajemen dan Kebijakan Publik UGM*, (Online), (<https://arificintaselvia.wordpress.com/kuliah/manajemen-publik/apa-itu-manajemen-publik/>, diakses 23 April 2018).

BOSOWA

